

BAB 2

PERUBAHAN POLITIK, EKONOMI DAN SOSIAL SERTA LAHIRNYA KEBIJAKAN EKONOMI BARU

2.1 Tinjauan umum

2.1.1 Sejarah terbentuknya Negara Bolivia dan permasalahannya (1532-1964)

Semasa penjajahan Spanyol Bolivia dibentuk dengan nama *Upper Peru* atau Characas, daerah yang saat ini dinamakan Bolivia, dan *Lower Peru* yang saat ini menjadi Negara Peru. Kedua daerah dibentuk Spanyol sebagai kesatuan daerah jajahan sekaligus wilayah administratif politik. Pada tahun 1545, daerah *Upper Peru* tercatat mempunyai potensi cadangan perak yang sangat besar dengan luas wilayah yang sangat luas, hal yang membuat daerah *Upper Peru* menjadi daerah yang kaya akan bahan tambang.¹ Pada tahun 1825 daerah *Upper Peru* (Bolivia) mendapatkan kemerdekaannya secara resmi melalui perjuangan panjang pejuang-pejuang asli Bolivia,² Simon Bolivar³ menjadi salah satu tokoh pembebasan rakyat Bolivia dari pengaruh kolonialisme Spanyol. Bolivia pada awal berdirinya merupakan sebuah Negara dengan daerah teritorial yang sangat besar. Tercatat, bagian selatan Chili, daerah perbatasan Brasil, dan daerah perbatasan dengan Paraguay yang disebut sebagai daerah *Chaco* adalah bagian dari daerah Bolivia. Banyaknya peperangan dan perlawanan membuat Bolivia sebagai Negara dengan teritorial terbesar kehilangan daerah teritorialnya.⁴

¹ Spanyol datang ke Bolivia pada tahun 1524 dan mulai melakukan kolonisasi pada tahun 1532. Lihat Jan Knippers Black, *Latin America: It's Problem and It's Promise*, (London: Westview Press, 1984), hlm. 403.

² Abad 18 produksi besar-besaran dari hasil perak tidak lagi menjadi andalan karena biaya ekspor yang meningkat, kedudukan Spanyol semakin melemah di kawasan *Upper Peru*, dan depresi ekonomi semakin membesar, keadaan ini dimanfaatkan penduduk asli untuk melakukan pemberontakan terhadap kolonialisme Spanyol, dan pada tanggal 6 Agustus 1825 daerah *Upper Peru* meraih kemerdekaannya. Benjamin Kohl dan Linda Farthing, *Impasse in Bolivia: Neoliberal Hegemony and Popular Resistance*, (London: Zed Books, 2006), hlm. 40.

³ Simon Bolivar dikenal sebagai tokoh nasionalis pembebas Amerika Latin dari penjajahan Spanyol, dikenal dengan sebutan "*el libertador*" (pembebas). Selain Simon Bolivar, nama-nama seperti Simon Rodriguez, Francisco de Miranda, Ezequiel Zamora Tupac Amaru, Jose Marti, Sandino, Farabundo Marti adalah nama-nama para pejuang kebebasan nasional yang menjadi inspirasi gerakan-gerakan perlawanan, Simon Bolivar tercatat sebagai presiden pertama Bolivia (12 Agustus 1825-26 Januari 1825), lihat Richard Gott, *Hugo Chavez and the Bolivarian revolution*, (London: Verso, 2005), hlm. 91-116.

⁴ Tepat 7 Juni 1879 terjadi peristiwa perang antara Peru, Chili, dan Bolivia yang lebih dikenal dengan *war of the pacific*. Perang yang berlangsung selama lima tahun ini terjadi akibat pelanggaran perjanjian yang pernah dilakukan antara Bolivia dengan Chili tahun 1874. Dalam perjanjian itu, Chili mengakui hak Bolivia atas gurun pasir Atacama dan perusahaan Chili di kawasan itu dibebaskan dari pajak selama 25 tahun ke depan. Namun, Bolivia meminta pajak pada tahun 1878, sehingga Chili menduduki pelabuhan Antofagasta. Sebagai reaksi, Bolivia mendeklarasikan perang dengan dukungan Peru. Angkatan laut Chili meraih kemenangan besar dan Bolivia mundur dari perang. Namun, Chili meneruskan perang dengan menduduki ibu kota Peru, Lima. Setelah lewat dua tahun masa pendudukan. Peru

Tabel 1 Hilangnya daerah teritorial Bolivia, (1825-1985)

ke Daerah (Negara)	Km ²
Argentina	170.758
Brasil	490.430
Chili	120.000
Paraguay	234.000
Peru	250.000
Total Area 1825	2.363.769
1985	1.098.581

Sumber: *Atlas Geografico de La Republica de Bolivia*, Barcelona, 1985 dalam Benjamin Kohl dan Linda Farthing, *op. cit*, hlm. 43.

Setelah Bolivia meraih kemerdekaannya dan kehilangan hampir sebagian wilayah teritorialnya, Bolivia dihadapkan pada situasi politik dan ekonomi yang tidak menentu dalam suatu pencapaian stabilitas Negara. Berbagai aksi pemberontakan dan perlawanan rakyat dan kudeta militer menjadikan Negara Bolivia dihadapkan pada situasi yang sulit. Pada tahun 1949, aksi pemberontakan terjadi di daerah Catavi, perlawanan yang terjadi selama beberapa tahun terakhir ini mendapat dukungan penuh dari pihak MNR. Dua tahun setelah gerakan perlawanan di Catavi pemilu kembali dilakukan dan mengantarkan Paz Estenzorro tampil sebagai pemenang dari partai MNR, kemenangan ini tidak terlepas dari program kebijakannya dengan menasionalisasi dan reformasi kepemilikan tanah bagi penduduk pribumi, akan tetapi hasil ini membuat pihak militer kembali mengambil peran dengan menghapuskan hasil pemilu yang dicapai.⁵ Disisi lain, kesatuan pihak militer mengalami krisis kepemimpinan dengan tidak bisa mempersatukan seluruh angkatan bersenjata Bolivia. Pada sisi yang berbeda MNR mencoba mengambil alih kekuasaan, MNR mengambil alih dan merampas gudang persenjataan serta mendistribusikan senjata kepada masyarakat sipil terutama kelas pekerja (buruh tambang), keadaan ini memaksa militer mundur dan

merupakan sekutu Bolivia dalam perang ini, ketidakcakapan strategi perang dengan kepemimpinan Daza mengharuskan Bolivia mengalami kekalahan pada tahun 1880, 1904 Bolivia secara resmi menyerahkan daerah pantai tersebut kepada Chili dengan menandatangani *Treaty of Peace and Friendship*. Lihat Contry Studies: Bolivia, "From the War of the Pacific to the Chaco War"; diperoleh dari [http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field\(DOCID+bo0020\)](http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+bo0020)); Internet; diakses 24 Agustus 2008.

⁵ Argentina merupakan negara tempat dimana Paz Estenzorro dan para intelektual MNR mengasingkan diri. Setelah Paz memenangkan pemilu dan pihak militer mengambil alih hasil dari pemilu 1951, General Hugo Ballivián Rojas (1951-52) yang memimpin proses tersebut naik sebagai presiden Bolivia, dibawah Ballivan Bolivia berada pada situasi yang kacau, kerusakan semakin membesar dan tidak terbendung. *Ibid*; Lebih dari 190 kudeta dan percobaan kudeta terjadi di Bolivia semenjak kemerdekaannya di tahun 1825, dengan permasalahan ini stabilitas politik di Bolivia mengalami pasang surut kekuasaan dan perubahan keadaan ekonomi sosial. Lihat Donna Lee Van Cott, *Bolivia: The Construction of a Multiethnic Democracy*, dalam Howard J Wiarda dan Harvey F. Kline, *Latin American Politics and Development*, 6th edition, (Colorado: Westview Press, 2007), 17

menyerah dalam pertempuran selama tiga hari. Setelah MNR berhasil melakukan pemberontakan Paz Estenssoro naik sebagai presiden pada tanggal 16 April 1952.⁶

Proses perubahan radikal terjadi ketika nasionalisasi dan program *land reform* dijalankan dimasa pemerintahan Paz Estenssoro, Perusahaan Pertambangan Bolivia (*Corporacion Minera Boliviana* – COMIBOL) menjadi bagian penting dalam menjalankan pertambangan nasional yang mandiri. Selain itu reformasi agraria yang dijalankan pemerintah ditahun 1953 dengan memberikan tanah kepada para petani sebagai bagian dari hak yang diberikan oleh pemerintah. Kelas pekerja buruh tambang menjadi kelas yang sangat berpengaruh dalam pemerintahan, hal ini disebabkan peran serta kelas buruh tambang dalam pertempuran di tahun 1952.

Setelah memberikan pengaruh yang sangat besar kelas buruh tambang mengorganisir persatuan para pekerja (*Confederacion Obrera Boliviana* – COB), tujuan COB adalah menjamin keselamatan dan mengontrol para pekerja yang ada, disisi yang berbeda MNR memberikan hak veto kepada para pekerja untuk memberikan partisipasi dan aspirasi dalam keputusan yang akan dibuat oleh COMIBOL, selain itu pemerintah menaikkan upah buruh dan memanggil kembali para pekerja yang telah dikeluarkan sebelumnya.⁷

2.1.2 Dibawah pemerintahan militer dan menuju transisi demokrasi (1964-1985)

Rene Barrientos⁸ adalah presiden pertama dalam sejarah Bolivia dengan kepemimpinan diktator dibawah pemerintahan militer. Barrientos menjanjikan pemulihan ekonomi dan stabilitas politik Bolivia pasca revolusi 1952 yang terjadi, dan kekuasaan penuh oleh pihak MNR, akan tetapi kebijakannya masih melanjutkan kebijakan ekonomi yang dibentuk oleh MNR yaitu kebijakan Industri Subsitusi Impor (ISI). Dibawah kepemimpinan Barrientos pula, sektor ekonomi mengalami pertumbuhan sebesar 6,5% per tahun, selanjutnya kenaikan harga timah memberikan keuntungan

⁶ Ditahun 1952 keadaan ekonomi Bolivia jauh lebih buruk dari masa sebelumnya, pemerintahan pada masa *sexenio* (masa enam tahun sebelum revolusi 1952) mencoba mengembangkan alternatif untuk menstabilisasi sektor ekonomi dengan menaikkan pajak bagi golongan atas, dan juga mereduksi pengeluaran sosial. MNR sebagai partai yang memegang kendali pemerintahan terkooptasi oleh kelompok konservatif, dan menyebabkan MNR menjadi partai politik yang kental dengan klientelisme dan sistem patronase. Lihat Benjamin Kohl dan Linda Farthing, *op. cit.*, hlm. 48; Contry Studies: Bolivia, “The Unfinished Revolution”, diperoleh dari [http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field\(DOCID+bo0029\)](http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+bo0029)); Internet; diakses 24 Agustus 2008; lihat juga analisa Samuel P. Huntington tentang Revolusi yang tidak selesai, Samuel P. Huntington, *op. cit.*, hlm. 504-513

⁷ Contry Studies: Bolivia, “The Bolivian National Revolution 1952-1964: Radical Reforms”, diperoleh dari [http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field\(DOCID+bo0028\)](http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+bo0028)); Internet; diakses 24 Agustus 2008

⁸ Rene Barrientos Ortuno (presiden, 1964-65; wakil presiden, Mei 1965-January 1966; dan presiden, 1966-69) adalah presiden pertama dengan kepemimpinan diktator. Barrientos meninggal dalam sebuah kecelakaan helikopter pada tanggal 27 April 1969. Lihat Answer.com. “Biography: Rene Barrientos Ortuno.” diperoleh dari <http://www.answers.com/topic/ren-barrientos>; Internet; diakses 24 Agustus 2008; Bookrags. “Rene Barrientos Ortuno Biography.” diperoleh dari <http://www.bookrags.com/biography/rene-barrientos-ortuno/>. Internet; diakses 17 Oktober 2008.

pertama bagi COMIBOL di tahun 1966. Barrientos juga mendorong sektor swasta dan investasi asing untuk menanamkan modal di Bolivia.⁹

Kekacauan politik di Bolivia tidak bisa dihindari lagi ketika banyaknya kebijakan Barrientos yang mendiskriminasikan kelas pekerja melalui pengurang upah, pemutusan tenaga kerja sepihak, dan pembubarisan konfederasi kelas pekerja Bolivia (*Confederacion Obrera Boliviana – COB*). Kelas pekerja tambang menunjukkan aspirasi mereka dengan berbagai aksi penolakan. Di tahun 1967 para pekerja buruh tambang beserta para keluarga dibunuh oleh pihak militer sebagai bagian dari program stabilisasi ekonomi dan politik di Bolivia dan juga meredam aksi perlawanan yang semakin besar.¹⁰

Kepemimpinan diktator militer selanjutnya berada dalam kekuasaan Hugo Banzer¹¹ yang mendapatkan dukungan dari Nationalist Popular Front (*Frente Popular Nacionalista – FPN*), MNR dibawah kepemimpinan Paz Estenssoro, dan The Bolivian Socialist Falange (*Falange Socialista Boliviana – FSB*) dibawah kepemimpinan Mario Gutierrez. Ditahun pertamanya Banzer memimpin, keadaan ekonomi Bolivia mengalami pertumbuhan yang cukup baik, hasil ekspor meningkat tiga kali lipat antara tahun 1970-1974, hal ini didorong melalui produksi hasil pertambangan minyak, gas alam, dan sumber mentah lainnya. Produksi kapas juga menyumbangkan devisa bagi Bolivia dengan peningkatan produksi yang cukup signifikan mencapai tiga kali lipat hasil produksi antara tahun 1970 dan 1975.¹²

Keadaan ekonomi yang membaik tidak diimbangi dengan situasi politik yang terjadi di Bolivia, dan ketika keadaan politik ini memburuk mata uang Bolivia (peso) mengalami devaluasi mata uang. Pemerintahan militer mengambil peran dengan melakukan aksi brutal, di sisi lain masyarakat dan para petani lokal melakukan aksi pemblokiran jalan sebagai bentuk protes mereka ketika harga-harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan ditahun 1974.¹³ Keadaan politik disertai ekonomi yang mengalami penurunan mengancam posisi Banzer sebagai presiden Bolivia,

⁹ Salah satu perusahaan swasta Gulf Oil Company diijinkan Barrientos untuk mengekspor minyak tanah dan gas alam dari Bolivia. Benjamin Kohl dan Linda Farthing, *op. cit*, hlm. 50

¹⁰ Contry Studies: Bolivia, “Military Rule 1964-1982: The Presidency of Barrientos”, Diperoleh dari [http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field\(DOCID+bo0030\)](http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+bo0030)); Internet; diakses 24 Agustus 2008

¹¹ Hugo Banzer adalah presiden Bolivia yang berasal dari kalangan militer, karir kepresidenannya berlangsung selama dua periode, 22 Agustus 1971-21 Juli 1978 Banzer dikenal sebagai diktator militer, kepemimpinan periode pertamanya diperoleh melalui kudeta terhadap pemerintahan Juan Jose Torres. Lihat Benjamin Kohl dan Linda Farthing, *op. cit*, hlm. 50

¹² Contry Studies: Bolivia, “The Banzer Regime”, diperoleh dari [http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field\(DOCID+bo0032\)](http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+bo0032)); Internet; diakses 24 Agustus 2008

¹³ Aksi kekerasan militer ini dilakukan oleh Colonel Andrés Sélich (Menteri Dalam Negeri) dengan menghapuskan persatuan buruh serta penutupan Universitas, pembunuhan disertai pembantaian terjadi di tahun 1974 ketika massa melakukan aksi pemblokiran jalan. *Ibid*

kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Banzer tidak mendapatkan dukungan politik yang berarti ketika keadaan ekonomi mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Dimasa pemerintahan Hugo Banzer peta politik di Bolivia mengalami perubahan yang cukup signifikan, dimasa ini pula Bolivia mengalami krisis ekonomi yang cukup tajam. Dimasa pemerintahannya pula hutang negara meningkat sangat tajam dari US \$500 juta ditahun 1971 menjadi US \$2,5 milyar di tahun 1978.¹⁴ krisis ini membawa Bolivia pada suatu sisi yang tidak menentu, terlebih lagi ketika dunia Internasional terutama negara-negara penghutang memberi tekanan kepada Banzer untuk meliberalisasi sistem politik dan memberikan pengarahannya agar Bolivia dapat mengadakan pemilu, keterbukaan sistem politik dan pemerintahan politik merupakan syarat mutlak bagi pencairan pinjaman.¹⁵ Proses keterbukaan sistem politik ini mengarahkan Bolivia menuju transisi demokrasi dan proses pemilihan umum.

Pada tahun 1980 Hernan Siles Zuazo dan partai yang dipimpinnya UDP (*Unidad Democrática y Popular*) memenangkan pemilihan secara mayoritas, akan tetapi kemenangan ini diambil alih oleh General Luis García Meza, Meza sendiri hanya berada dalam pemerintahan Bolivia selama satu tahun. Kebijakan Meza dengan kegiatan ekspor kokain yang mencapai US\$850 juta pada tahun 1980 sampai dengan 1981 membuat Meza berada dalam ancaman dunia internasional ditambah dengan korupsi, dan kekejaman militer membuat pemerintahan Meza tersudutkan. Hernan Siles Zuazo akhirnya menyudahi kepemimpinan militer setelah kongres mensahkan Hernan Siles Zuazo menjabat sebagai presiden Bolivia pada 10 Oktober 1982.¹⁶

2.2 Fase neoliberalisme dan permasalahannya (1985-2006)

Setelah nasionalisasi yang dilakukan pemerintah diawal tahun 1950an yang lebih dikenal dengan Revolusi 1952, perekonomian di Bolivia berupaya memperbaiki dan memulihkan sektor perekonomian oleh pemerintah terdahulu.

¹⁴ Benjamin Kohl dan Linda Farthing, *op. cit.*, hlm. 51.

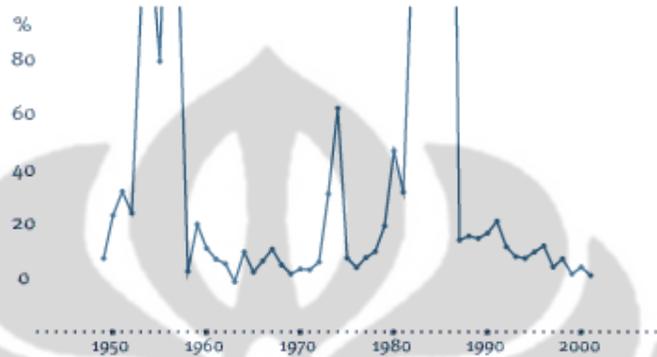
¹⁵ Hugo Banzer terpaksa mengadakan pemilu tahun 1978 yang merupakan tuntutan dan syarat pinjaman utang atau pencairan dana pinjaman, pemilu ini gagal berjalan karena banyaknya indikasi kecurangan yang terjadi. *Ibid*, hlm. 150-153

¹⁶ General David Padilla Arancibia (1978-1979) menjadi presiden Bolivia setelah melancarkan aksi kudeta berdarah terhadap General Pereda yang tidak melaksanakan proses pemilu. Ketika pemilu dilaksanakan Guevara Arze menjadi presiden walaupun tidak secara mayoritas dalam hasil yang diperoleh, Arze menjadi presiden sementara pada 8 Agustus 1979. Pada bulan November kembali terjadi kudeta dibawah pimpinan Colonel Alberto Natusch Busch terhadap Arze sekaligus membawanya menjadi presiden Bolivia. Lidia Gueiler Tejada (1979-80) menjadi presiden sementara Bolivia berikutnya dengan dukungan pihak diplomat AS, Tejada menjadi presiden wanita pertama Bolivia. Lihat Contry Studies: Bolivia, "Transition to Democracy", diperoleh dari [http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field\(DOCID+bo0033\)](http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+bo0033)); Internet; diakses 24 Agustus 2008

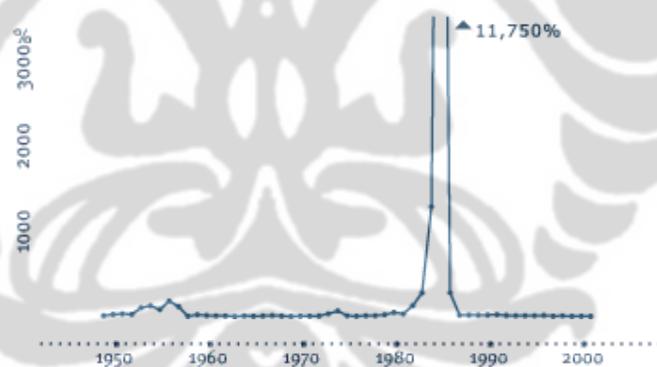
2.2.1 Lahirnya kebijakan ekonomi baru

Pada tahun 1985, penurunan nilai ekonomi melanda Bolivia, dengan tingkat inflasi tertinggi di dunia sehingga mengakibatkan mata uang Bolivia hampir tak bernilai. Tingkat inflasi yang terus meningkat dari tahun 1982 sebesar 296%, tahun 1984 sebesar 2.175%, dan pada tahun 1985 mencapai lebih dari 8.168% (lihat grafik inflasi).¹⁷

Grafik inflasi di Bolivia 1950-2000



Grafik diperbesar antara tahun 1980-1990



sumber: http://www.pbs.org/wgbh/commandingheights/lo/countries/bo/bo_inf.html

Tingginya tingkat inflasi membuat Negara dalam keadaan kritis dalam memperoleh stabilitas sistem ekonomi dan politik. Pemerintah dimasa Paz Estensorro (1985-1989) berpaling kepada Profesor Harvard, Jeffrey Sachs untuk meminta bantuan. Setelah berkonsultasi dengan Bank

¹⁷ Carlos F. Toranzo Roca, *Bolivia: Crisis, Structural Adjustment, and Democracy*, dalam Alex E. Fernandez Jilberto and Andre Mommen, *Liberalization in the Developing World: Institutional and Economic Changes in Latin America, Africa, and Asia* (New York: Routledge, 1996), hlm. 162-164.

Dunia dan *International Monetary Fund* (IMF),¹⁸ sebuah program Penyesuaian Struktural dicanangkan untuk Bolivia, program ini ditujukan untuk mengembalikan sekaligus menata ulang perekonomian Bolivia. Perencanaan program tersebut diperkuat oleh Dekrit Presiden 21060 Dekrit Presiden (*Decretos Supremos* – DSs 21060).¹⁹

Pada Agustus 1985, pemerintah Bolivia secara resmi mengumumkan program penyesuaian struktural (*Structural Adjustment Program* – SAP) yang diberi nama Kebijakan Ekonomi Baru (*New Economic Policy* – NEP) isi dan butir yang termasuk kedalam NEP, antara lain:

Menghapuskan pembatasan-pembatasan impor dan ekspor (liberalisasi kebijakan impor dan ekspor), menetapkan tingkat perdagangan tunggal dan fleksibel, membekukan upah sektor publik selama empat bulan (kemudian dikurangi sampai tiga bulan), memberikan kesempatan kepada perusahaan-perusahaan negara satu bulan untuk mengemukakan program-program rasionalisasi (yaitu pemutusan hubungan kerja) staf, memperkenalkan “kontrak bebas” pada semua firma.²⁰

Perubahan kebijakan yang dilakukan dan diterapkan di mulai tahun 1985 yang ditujukan untuk menekan inflasi berhasil menekan laju inflasi yang semakin meningkat. Pada tahun 1987 program yang dimaksudkan untuk menstabilisasikan pertumbuhan perekonomian dinilai sangat positif setelah dua tahun program NEP berjalan, akan tetapi dampak sosial yang diakibatkan program ini memberikan pengaruh yang buruk bagi kelas pekerja dan para petani.²¹ Program NEP mendapatkan berbagai masalah baru bahkan dalam hal penerapannya menghadirkan berbagai permasalahan yang membuat masyarakat berada dalam posisi yang kritis dan tidak menentu.

Terapi kejut (*shock therapy*) dengan dekrit yang menghapuskan pekerjaan, kontrol harga, dan tunjangan-tunjangan menjadi awal dari resesi. Program penyesuaian struktural di Bolivia “menghancurkan”, khususnya para petani kecil dan kelas pekerja, SAP telah menyebabkan sebagian besar kredit dan investasi pedesaan, beralih kepada kegiatan-kegiatan agrobisnis dan petani-petani

¹⁸ Bolivia, Polandia, dan Russia adalah Negara-negara yang mendapatkan saran dari Jeffrey Sachs. Lihat wawancaranya dan penerapan program penyesuaian dalam,

http://www.pbs.org/wgbh/commandingheights/shared/miniextlo/int_jeffreysachs.html; internet; diakses 19 Mei 2009

¹⁹ DSs dipergunakan untuk melengkapi hukum yang ditinggalkan oleh lembaga legislatif, dalam beberapa hal lembaga eksekutif dapat menggunakan DSs untuk menggantikan peran dari lembaga legislatif. Lihat Benjamin Kohl dan Linda Farthing, *op. cit.*, hlm. 83.

²⁰ Diambil dari Tony Avirgan, Laura Parsons, dan Ross Harmond, *Membujuk untuk Memproduksi Obat Bius Ilegal: Pengalaman Bolivia*, dalam William I. Robinson et al., eds., *Hantu Neoliberalisme* (Jakarta: C-BOOKS, 2003), hlm. 125.

²¹ Pada tahun 1987, program ini memberikan dampak sosial yang sangat buruk bagi rakyat Bolivia khususnya para pekerja yang terkena imbas dari proses liberalisasi ekonomi. Paul Mosley, “Microfinance and Poverty in Bolivia”, *Journal of Development Studies*, April 2001 dalam [http://www.tradewatch.org/documents/Bolivia_\(PDF\).PDF](http://www.tradewatch.org/documents/Bolivia_(PDF).PDF); Internet; diakses 24 Agustus 2008

berskala besar-menengah yang memproduksi untuk ekspor. Kebanyakan para petani kurang modal yang diperlukan di dalam produksi hasil-hasil ekspor dan kesulitan menjamin kredit. Satu bank yang secara tradisional memberikan pinjaman kepada para petani kecil, Banco Agricola Boliviano, telah ditutup. Dibawah NEP, tingkat bunga rata-rata diatas 20% per tahun, bahkan para petani merasa sangat sulit meminjam dalam jumlah banyak.²²

Sektor pertanian telah mengalami krisis, hal ini diperkuat dengan masuknya barang-barang impor pertanian yang berkompetisi dengan hasil-hasil pertanian lokal Bolivia, keadaan ini diperparah dengan adanya program “Pangan untuk Perdamaian”, disaat bersamaan subsidi bahan bakar minyak dipotong yang mengakibatkan peningkatan biaya transport produksi pertanian. Hasilnya terjadi peningkatan kemiskinan dengan lemahnya sumber daya manusia dalam hal pengelolaan sumber daya yang tepat dan kurang mampunya mengatasi persaingan. Bahkan dalam studi yang dibuat oleh Dana Internasional bagi pengembangan pertanian menyatakan, 97% dari populasi pedesaan hidup dibawah garis kemiskinan.²³

2.2.2 Pembaharuan kebijakan sektor ekonomi, sosial, dan politik

Pada masa pemerintahan Goni (masa pemerintahan 1993-1997), Bolivia kembali menjalankan program NEP,²⁴ dengan beberapa perubahan untuk meningkatkan dan menstabilkan perekonomian, selain itu penarikan investor menjadi fokus utama dimasa Goni memimpin. Dua perubahan kebijakan secara garis besar yang dilakukan oleh Goni antara lain: Kapitalisasi dan privatisasi, perubahan sektor publik (umum) menjadi kepemilikan swasta untuk seluruh investasi, sekaligus perbaikan atas sarana infrastruktur. Selanjutnya, melalui Sistem Pengatur Sektoral (*Sistema Regulatorio Sectoral*), sistem pengaturan yang independent, diberlakukan untuk mengatur hubungan antara sektor swasta, konsumen, dan negara.

Kunci dari penerapan program kapitalisasi melalui privatisasi perusahaan negara adalah SIRESE (*Sistema de Regulacion Sectorial*) yang merupakan produk undang-undang pemerintah ditahun 1994, yang membentuk sistem pengaturan (*Superintendency*) untuk perbaikan sektor

²² Tony Avirgan, Laura Parsons, dan Ross Harmond, *op. cit*, hlm. 128.

²³ The Development Group, “The World Bank, The IMF, and Illegal Drug Production: The Case of Bolivia”, dalam http://www.developmentgap.org/americas/Bolivia/The_WorldBank_theIMF_and_Illegal_Drug_Production_The_Case_of_Bolivia.pdf; Internet; diakses 24 Agustus 2008

²⁴ Gonzalo Sanchez de Losada (1993-1997), Goni berperan penting sekaligus arsitek dalam pembentukan program NEP melalui DS 21060 dan didukung penuh oleh golongan pebisnis. Lihat Benjamin Kohl dan Linda Farthing, *op. cit*, hlm. 65.

infrastruktur.²⁵ Sektor yang termasuk dalam *Superintendency* diantaranya adalah listrik, telekomunikasi, hidrokarbon, dan industri transportasi.²⁶

Diawal pemerintahan, Goni menerapkan kebijakan yang dikenal dengan nama “*the Plan de Todos*” (rencana untuk semua), berbeda dengan kebijakan NEP sebelumnya yang semata-mata berbentuk prinsip untuk restrukturisasi ekonomi, program ini berusaha untuk merubah pola pikir masyarakat Bolivia agar menjadi lebih modern.

Kebijakan yang diterapkan Goni merupakan rencana pembaharuan dari program terdahulu (NEP). Isi dari program ini adalah pembentukan kesadaran baru hubungan negara dan masyarakat melalui privatisasi perusahaan negara, desentralisasi administrasi dan fiskal, reformasi agraria kedua, reformasi pendidikan.²⁷ Kebijakan ini diharapkan akan dapat menciptakan iklim kapitalisasi yang dapat menghasilkan dana untuk merestrukturisasi ekonomi dan memberikan pelayanan sosial kepada rakyat Bolivia.

Dimasa pemerintahan Goni, undang-undang terhadap kedudukan warga (*Law of Popular Participation* – LPP) dibentuk pada tahun 1994 dalam usaha pemerintah lebih mendekatkan diri terhadap rakyat Bolivia, sekaligus rakyat Bolivia dapat menilai kinerja institusi pemerintah yang dikelola secara profesional.

Dengan LPP ini, pemerintah pusat berusaha untuk memberikan bagian yang lebih kepada pemerintah daerah maupun rakyat di daerah untuk secara langsung ikut dalam menentukan kebijakan baik ekonomi, sosial, maupun politik. Selain itu, kebijakan ini juga mengakui adanya organisasi-organisasi di tingkat akar rumput. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, pemerintah Bolivia mengakui secara resmi organisasi-organisasi massa di tingkat akar rumput seperti organisasi warga urban, serikat-serikat petani *campesino* dan organisasi komunitas asli Indian.²⁸

²⁵ SIRESE dikelola secara independent, pengawasannya dilakukan selama lima tahun masa periode. Fungsi pengawasan antara lain, pengabulan atas hak, mengatur tarif, mempromosikan kompetisi, mengawasi perjanjian operator, memecahkan permasalahan diantara perusahaan, persetujuan, mendengar permohonan pihak pertama, dan menerima keluhan konsumen. Lihat Gover Barja, David McKenzie, dan Miguel Urquiola, “Capitalization and Privatization in Bolivia: An Approximation and to an Evaluation”; diperoleh dari http://www.mpd-ucb.edu.bo/publicaciones/WP_007_Capitalization%20and%20privatization%20in%20Bolivia%20an%20approximation%20to%20an%20evaluation.pdf; internet; diakses 24 Agustus 2008.

²⁶ Penjelasan penerapan privatisasi listrik, transportasi, dan telekomunikasi masa pemerintahan Goni secara lengkap. Lihat Benjamin Kohl dan Linda Farthing, *op. cit.*, hlm. 103-124,

²⁷ Secara lengkap kebijakan yang dikembangkan dan diterapkan oleh Goni melalui *the Plan de Todos* dapat dilihat dalam. *Ibid*, hlm. 85.

²⁸ *Ibid*, hlm. 94.

Penerapan LPP dengan mengoptimalkan peran pemerintah daerah dilakukan dengan memberikan dana kepada kotamadya (daerah) sebesar 20% dari anggaran nasional.²⁹ Pengalokasian dana ini ditujukan menciptakan iklim yang lebih baik dalam keselarasan partisipasi politik khususnya di tingkat akar rumput, selain itu pemerintah memberikan hak politik seperti apa organisasi-organisasi yang dapat masuk atau bagian dari organisasi akar rumput (*Organizacaiones Teritoriales de Base – OTB*).

Dalam implementasi kebijakan LPP melahirkan banyak permasalahan mengenai keterwakilan secara legitimasi organisasi dalam OTB, konfederasi persatuan buruh dan petani Bolivia (*Confederacion Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia – CSTUCB*) mengkritik penerapan LPP yang justru hanya ‘mendesentralisasi kemiskinan’ dan mengurangi peran pemerintah pusat dengan menyerahkan tanggungjawab kepada pemerintah daerah.³⁰

Di tahun 1996, Goni membentuk kebijakan reformasi atas tanah (*the National Agrarian Reform Institute – INRA*), kebijakan ini ditujukan dan diciptakan untuk para *campesino* dan para penduduk asli sebagai pemilik tanah sekaligus memberikan perlindungan yang layak. Akan tetapi dalam praktek pelaksanaannya kebijakan INRA telah gagal diterapkan, khususnya memberikan perlindungan kepada para *campesino* dan masyarakat pada umumnya sangat dirugikan, kebijakan ini tidak terealisasi dengan baik melalui sebuah proses perencanaan yang matang.³¹

Hampir sama dengan LPP, pembentukan INRA telah mendatangkan banyak protes terutama dari kalangan kelas petani yang terkena secara langsung dampak buruk reformasi atas tanah. Karena, alih-alih memberikan kepemilikan tanah kepada para petani, reformasi ini justru memberikan hak kepemilikan tanah kepada pihak yang dapat membayar pajak. Sehingga dengan metode yang seperti ini reformasi agraria yang dilakukan justru semakin meningkatkan konsentrasi kepemilikan tanah kepada segelintir individu.³²

Pengaruh yang diberikan undang-undang tersebut memberikan kesulitan-kesulitan bagi masyarakat lokal, ketiadaan sumber daya adalah permasalahan bagi para masyarakat atau petani. Selanjutnya dalam hal tanah permasalahan yang muncul adalah adanya praktek penjualan tanah tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu (Karena kepemilikan individu atau pribadi), hal ini dikarenakan keberadaan tanah beralih fungsi menjadi suatu komoditas bukan lagi sebagai sumber daya bagi kebutuhan masyarakat.

²⁹ George Gray Molina, “Popular Participation, Social Service Delivery, and Poverty Reduction 1994-2000”; diperoleh dari http://www.adb.org/Documents/Events/2002/Citizen_participation/Bolivia.pdf; internet; diakses 24 Agustus 2008.

³⁰ *Ibid*, hlm. 133.

³¹ Benjamin Kohl dan Linda Farthing, *op. cit*, hlm. 92.

³² *Ibid*, hlm. 93.

2.2.3 Penerapan privatisasi perusahaan negara

Privatisasi perusahaan negara (*state-owned enterprises* – SOEs) menjadi salah satu agenda yang menjadi fokus utama kebijakan pemerintahan Goni, lima perusahaan negara menjadi bagian dari proses kebijakan privatisasi sebesar 50 persen, hal ini dilakukan untuk menarik minat investor asing dalam menciptakan sekaligus meningkatkan persaingan lingkungan global yang kompetitif, sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan ribuan lapangan kerja.³³

Privatisasi bukan merupakan suatu hal yang baru, kegiatan yang mendefinisikan privatisasi telah digunakan sebelum tahun 1980an. Menurut *the Webster Dictionary (Ninth Collegiate Edition)*, istilah privatisasi telah digunakan di tahun 1948. Istilah privatisasi didefinisikan sebagai perpindahan dari kepemilikan publik (umum) kepada sektor swasta. Definisi umum mengenai privatisasi mengacu pada perpindahan hak milik dengan bertujuan menciptakan keuntungan yang dilakukan oleh suatu perusahaan melalui perpindahan kepemilikan publik kepada swasta.³⁴ Privatisasi juga mengacu pada tiga perubahan besar, yang diantaranya perubahan kepemilikan, perubahan organisasi, dan perubahan pengelolaan.³⁵ Privatisasi saat ini telah mengalami perbedaan yang cukup besar bukan hanya proses pembentukan privatisasi itu sendiri, yang lebih penting adalah suatu perangkat efektif untuk memperbesar akses pasar untuk memperoleh keuntungan melalui perusahaan multinasional atau asing (*transnational corporations* – TNCs).³⁶

Melalui kebijakan *the Plan de Todos* sebuah kebijakan ekonomi ekonomi yang mengarah pada suatu konstitusi pasar ‘demokrasi pasar bebas’ yang diharapkan meningkatkan persaingan global yang kompetitif bagi Bolivia, pemerintah melelang lima perusahaan negara terbesarnya, dalam menjalani promosi kapitalisasi ini.³⁷ Untuk melengkapi implementasi dari sistem kapitalisasi, reformasi setiap sektor industri menjadi fokus utama dan tujuan akhir dalam pencapaian menuju kompetisi pasar dan menunjang efisiensi yang ada.

Dimasa pemerintahan Goni tingkat pertumbuhan ekonomi Bolivia mencapai lebih dari 4% yang dikarenakan sejumlah perjanjian perdagangan bebas dengan Meksiko serta masuknya Bolivia menjadi anggota dari organisasi ekonomi regional Mercosur, dengan mengagendakan privatisasi

³³ Goni juga berpendapat bahwa pajak pendapatan yang akan dihasilkan dari investasi perusahaan asing akan dapat menutupi penghasilan yang tadinya dihasilkan dari perusahaan sebelum di privatisasi (SOEs). *Ibid*, hlm. 103-104.

³⁴ Bon Databank and Research Center, *Privatization: Corporate Takeover of Government* (Manila: IBON BOOKS, 2003), hlm.1.

³⁵ V. V. Ramanadhan, *Constraints and Impact of Privatization* (London: Routledge, 1993), hlm. 2.

³⁶ Bon Databank and Research Center, *op. cit*, hlm.2.

³⁷ Lebih dari 100 negara telah melakukan kebijakan privatisasi perusahaan negara semenjak tahun 1998 dengan nilai pasar US\$ 735 milyar. Benjamin Kohl dan Linda Farthing, *op. cit*, hlm. 105.

menjadi komponen kunci bagi kebijakan neoliberal Bolivia melalui kerjasama yang dijalankan dengan Bank Dunia dan IMF.³⁸ Goni pun berpendapat bahwa dengan kebijakan yang dikeluarkan dalam menarik minat investor internasional akan meningkatkan potensi pendapatan pajak yang secara tidak langsung dapat menggantikan biaya atau pendapatan yang hilang dari penjualan perusahaan negara.



³⁸ Public Citizen, Water Privatization Case Study: Cochabamba Bolivia, dalam [http://www.citizen.org/documents/Bolivia_\(PDF\)](http://www.citizen.org/documents/Bolivia_(PDF)); internet; diakses 24 Agustus 2008.

Tabel 2 Penjualan perusahaan negara (privatisasi) dibawah kepemimpinan Goni (1993-1997)³⁹

Sektor	Perusahaan	Tanggal Pelepasan	Pemegang Saham Pokok	Negara Asal	Penawaran 50% saham perusahaan (US \$ dalam Jutaan)
Hidrokarbon (YPFB)	Petrolera Chaco Transredes Empresa Petrolera Andina	April '97	Amoco	AS	306.7
		April '97	Enron, Shell	AS, Belanda	263.5
		April '97	YPF,Perez, Pluspetrol	Argentina Spanyol	264.8
Telekomunikasi	ENTEL	November '95	STET	Italia	610.0
Transportasi	LAB (penerbangan) ENFE (kereta api) Andina Oriental	October '95	VASP	Brasil	47.5
		Maret '96	Cruz Blanca	Chili	13.2
		Maret '96	Cruz Blanca	Chili	25.9
Listrik	Corani Guaracachi Hermoso	Juli '95	Dominion	AS	33.0
		Juli '95	Energy	AS	35.0
		Juli '95	Energy Initiatives Constellation Energy	AS	30.0

Sumber: Diambil dari Benjamin Kohl dan Linda Farthing, *Impasse in Bolivia: Neoliberal Hegemony and popular Resistance*, (London: Zed Books, 2005), 110

Usaha Goni dalam menerapkan privatisasi demi mendatangkan investasi asing memberikan kerja nyata dengan lima perusahaan besar negara dari sektor telekomunikasi, transportasi, serta listrik yang telah diprivatisasi, bahkan perusahaan minyak dan gas negara (*Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos – YPFB*) terbagi menjadi tiga perusahaan multinasional.⁴⁰ Meskipun perusahaan minyak dan gas Negara sebelum diprivatisasi mempunyai permasalahan dengan banyaknya korupsi yang melanda perusahaan, perusahaan negara ini memiliki reputasi yang cukup

³⁹ Kasus privatisasi yang akan menjadi analisa dalam skripsi ini akan ditekankan pada kasus privatisasi hidrokarbon (yang diterapkan pada masa pemerintahan Goni), dan kasus privatisasi air di Cochabamba (masa pemerintahan Hugo Banzer).

⁴⁰ Pemisahan tiga perusahaan YPFB adalah Petrolera Chaco kepada pihak Amoco-AS, Transredes ke pihak Enron-AS dan Shell-Belanda, dan Empresa Petrolera Andina kepada pihak YPF Perez-Argentina dan Pluspetrol-Spanyol, semuanya dijual kepada pihak asing dan dilepas ditahun 1997. Selain sektor hidrokarbon, perusahaan negara sektor telekomunikasi, transportasi, dan listrik terkena program privatisasi. Lihat. Benjamin Kohl dan Linda Farthing, *op. cit*, hlm. 110.

baik ditingkat global,⁴¹ Organisasi minyak internasional OPEC (*Organization Petroleum Exporties Countries*) menilai Bolivia memiliki peran penting dalam menunjang pendapatan Negara untuk mendukung pembangunan sektor ekonomi.

2.3 Rezim neoliberalisme: melalui penataan tanaman koka

Daun koka adalah dari sebuah tanaman berdaun rimbun yang berasal dari sisi timur Pegunungan Andes. Koka juga merupakan sejenis tanaman yang daunnya dapat digunakan sebagai bahan baku kokain, akan tetapi secara tradisional oleh masyarakat asli bolivia, koka digunakan sebagai bahan tambahan untuk masakan atau dikunyah untuk menahan rasa sakit dan lapar dan juga untuk kebutuhan sehari-hari lainnya.⁴²

Tanaman *Erythroxylon coca* itu banyak ditanam di Bolivia, Peru, dan Ekuador.⁴³ Koka memang menjadi bahan baku untuk membuat kokain, tetapi secara tradisional menjadi bagian kebutuhan masyarakat Bolivia dan juga kebutuhan obat-obatan. Di Bolivia koka dikembangkan di perbukitan Yungas dan Chapare, koka juga telah menjadi bagian dari tradisi sehari-hari masyarakat Bolivia.

Antara tahun 1978 sampai dengan 1985 penanaman daun koka meningkat dari 12.000 hektar sampai dengan 80.000 hektar, peningkatan ini dapat dialokasikan sebagai hasil produksi yang cepat dari 35.000 metrik ton sampai dengan 150.000 metrik ton. Penghasilan yang didapat para petani koka dengan peningkatan dan keuntungan bersih mencapai US\$ 6.000 sampai dengan US\$ 9.000 setiap hektar per tahunnya.⁴⁴

Peningkatan produksi koka terus berlanjut memasuki pertengahan tahun 1980 sampai dengan tahun 1997. Ditahun ini produksi daun koka mencapai US\$ 500 juta per tahun atau sekitar 5 sampai 8 persen dari GDP, melebihi produksi pertanian lainnya.⁴⁵ Pada tahun 1989 kebijakan

⁴¹ *Ibid*, hlm. 120.

⁴² Lihat Belen Boville, *The Cocaine War in Context: Drugs and Politics* (New York: Algora Publishing, 2004), hlm. 72-73

⁴³ <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0312/19/Jendela/755332.htm>; Internet; diakses 24 Agustus 2008

⁴⁴ Jumlah keuntungan ini mencapai sepuluh kali keuntungan yang didapat bila dibandingkan dari hasil keuntungan produksi dari buah jeruk. Kevin Healy, "Bolivia and Cocaine: a Developing Country's Dilemmas", dalam <http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/119465363/PDFSTART>; Internet; diakses 24 Agustus 2008. Hal yang sangat menarik ketika coca ditanam setiap lima meter dari tanaman coca ditanami atau diselingi dengan buah jeruk. Lihat juga Robert E. Quirk, *op. cit*, hlm. 115.

⁴⁵ Benjamin Kohl dan Linda Farthing, *op. cit*, hlm. 74.

Amerika Serikat (AS) terhadap anti narkotika menghasilkan perang terhadap narkotik dan obat-obatan terlarang yang dikenal dengan *War on Drugs*.⁴⁶

Kebijakan yang dikeluarkan melalui pemerintahan AS ditujukan untuk menghilangkan peredaran kokain yang berasal dari koka, selain itu produksi daun *koka* telah menyebabkan berbagai permasalahan di Bolivia dari mulai peredaran obat bius illegal (kokain), kejahatan dan kekerasan, sampai pada masalah kerusakan lingkungan sekitar. Kebijakan AS juga ditujukan dalam rangka menguatkan dan menciptakan iklim perekonomian yang sehat bagi kedua negara. Selain itu Hugo Banzer yang kembali menjadi presiden Bolivia melalui pemilu tahun 1997 yang mengganti posisi dari Goni mengeluarkan kebijakan pengembangan alternatif bagi tanaman dan pembasmian koka (*anti-drugs*), yang dikenal dengan *coca zero*. Pembasmian ladang koka kembali dikuatkan dengan adanya undang-undang *law anti-drug* 1008.⁴⁷

Bolivia sebagai salah satu penghasil dan produksi terbesar daun koka mendapatkan imbas dari kebijakan seiring dengan kebijakan pemerintah AS dan kebijakan ekonomi baru yang diterapkan pemerintah Bolivia. Berbagai aksi penangkapan, pembunuhan dan penghancuran ladang koka menjadi agenda pemerintahan AS beserta para anggotanya dan bekerjasama atas persetujuan pemerintahan Bolivia. Penangkapan para petani koka mendatangkan permasalahan baru, selain para petani koka semakin tersisihkan dengan produk kebijakan pembasmian koka, hal lain adalah terjadinya kejahatan kemanusiaan dengan beragam aksi penangkapan para petani koka dan pembasmian ladang koka di Bolivia.⁴⁸

Produksi koka dan peredaran obat bius (kokain) yang sampai pada kawasan Amerika bagian utara mengancam posisi AS menyangkut perdagangan bebas, terlebih lagi program NEP yang dicanangkan pemerintahan Bolivia ditahun 1985 membawa Bolivia untuk mengembangkan potensi pasar dalam persaingan ditingkat global.

Dalam kaitannya dengan perdagangan bebas Bank Dunia dan IMF adalah dua organisasi internasional yang paling berkuasa, IMF memiliki misi untuk mengupayakan stabilitas keuangan dan ekonomi melalui pemberian utang, sedangkan Bank Dunia juga merupakan aktor penting

⁴⁶ Bolivia merupakan bagian dari program *War on Drugs*, selain itu Peru dan Kolombia merupakan dua Negara yang menjadi penghasil daun coca dan kokain yang disebut sebagai ancaman serius pertumbuhan produksi obat-obatan terlarang, ketiga Negara ini menjadi fokus strategi internasional AS untuk memerangi peredaran obat-obatan terlarang

⁴⁷ Setelah terpilih menjadi presiden Bolivia melalui pemilu 1997, pada tahun 2000 dalam keadaan sakit Banzer digantikan oleh presiden sementara Jorge Fernando Quiroga yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden, lihat "Bolivia", dalam DVD-ROM Microsoft® Encarta® Encyclopedia 2008

⁴⁸ Berbagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) telah terjadi di Bolivia, penangkapan disertai pembunuhan para petani koka menjadi wacana yang sangat besar. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan yang sangat besar dikalangan para aktivis HAM dunia.

pemberi utang dengan upaya mengurangi kemiskinan dan membiayai investasi untuk pertumbuhan ekonomi. Program SAP adalah salah satu program Bank Dunia untuk membentuk perdagangan pasar bebas dan juga bagian dari program neoliberalisme. Selain itu, melalui proses produksi perusahaan-perusahaan transnasional diatur melalui organisasi perdagangan global yang dikenal dengan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang ditandatangani April 1994 di Marrakesh, Maroko. Pada tahun 1995 GATT dilembagakan dalam organisasi perdagangan dunia baru yang lebih dikenal dengan World Trade Organization (WTO) yang mengatur seluruh sektor perdagangan bebas dunia.⁴⁹

Penetapan perdagangan bebas itu sendiri yang dibentuk pemerintah AS terdiri dari NAFTA⁵⁰ (*North American Free Trade Agreement*) untuk AS, Kanada, dan Meksiko, Mercosur untuk Amerika Selatan (termasuk Bolivia yang telah bergabung), APEC (*Asia Pacific Exporters Countries*) untuk wilayah Asia Pasifik. Khusus untuk Bolivia dengan adanya peredaran koka yang membesar merupakan hambatan bagi pencapaian pembentukan program pasar bebas, hal ini diperkuat dengan fakta bahwa AS berusaha mencanangkan program alternatif untuk menyingkirkan hasil produksi koka yang dianggap telah memberikan dampak buruk dengan menghasilkan produksi obat bius (kokain). Walaupun sebelum dicanangkan pengembangan alternatif, koka merupakan hasil produksi yang sangat membantu perekonomian Bolivia dan pemasukan devisa yang sangat besar. Program pemberantasan ladang koka menjadi salah satu kebijakan AS untuk mempercepat proses implementasi kebijakan pasar bebas (neoliberalisme) di Bolivia.⁵¹

2.4 Kelanjutan rezim neoliberalisme melalui privatisasi air

Setelah dimasa kepemimpinan Goni privatisasi menjadi pilar ekonomi untuk meningkatkan stabilitas ekonomi, Banzer yang terpilih pada pemilu 1997 kembali menjalankan pilar neoliberalisme sebagai salah satu tujuan pemerintahannya. Disamping itu kebijakan Banzer yang memunculkan berbagai macam polemik dan permasalahan adalah pembasmian ladang koka (*coca*

⁴⁹ Didalam IMF pihak AS memiliki kekuasaan secara mayoritas, hal ini dapat dilihat dari hak voting yang mencapai 17,8 %, selain AS tidak ada anggota dari Negara lain yang memiliki hak voting lebih dari 6 %, sementara mayoritas anggota Negara hanya memiliki kurang dari 1 %. Noer Fauzi, *Memahami Gerakan-gerakan Rakyat Dunia Ketiga* (Yogyakarta: Insist Press, 2005), hlm. 157-160

⁵⁰ Bertepatan dengan diluncurkannya perjanjian perdagangan pasar bebas Amerika Utara NAFTA, pemberontakan Zapatista di Chiapas muncul sebagai salah satu bentuk penolakan terhadap kebijakan pasar bebas. Banyak kalangan akademisi menilai bahwa gerakan Zapatista sendiri telah mengilhami gerakan anti-globalisasi sedunia, Zapatista sendiri diambil dari nama seorang tokoh revolusi berdarah Meksiko, Emiliano Zapata (1910-1920), lihat Subcomandante Marcos, *Kata Adalah Senjata* (Yogyakarta: Resist Book, 2005)

⁵¹ Kampanye Anti-Terrorisme yang dilakukan George Bush menjadi salah satu cara untuk mengatasi krisis kapitalisme global, mencari pasar baru dan sumber-sumber ekonomi baru. Lihat Nurani Soyomukti, *Revolusi Sandinista: Perjuangan Tanpa Akhir Melawan Neoliberalisme* (Yogyakarta: GARASI, 2008), hlm. 152.

zero) atas desakan dari pemerintahan AS, yang ditujukan untuk menciptakan perdagangan pasar bebas yang baik sekaligus untuk meredam aliran perdagangan obat bius internasional.

Program privatisasi berlanjut dengan rencana penjualan perusahaan air Negara dimasa pemerintahan Banzer (1997-2001), akan tetapi penjualan fasilitas umum ini tidak semudah privatisasi sebelumnya. Berkenaan dengan rencana yang akan dijalankan, pemerintahan dimasa pemerintahan Banzer melakukan regulasi terhadap sektor baru yang akan diprivatisasi. Tepatnya tahun 1999 undang-undang tentang air melalui *Water Law 2029* dikeluarkan sebagai standar nasional.⁵² Hasilnya penjualan pemerintah terhadap perusahaan air negara chocabamba (SEMAPA) ke pihak Aguas del Tunari (Tunari Waters) pada bulan September 1999, dengan durasi kontrak perjanjian selama 40 tahun. penjualan SEMAPA menambah panjang daftar perusahaan Negara yang telah diprivatisasi.⁵³

Mengacu pada masalah privatisasi air Peter Gleick mendefinisikan sebagai akselerasi transfer dari proses produksi, distribusi, dan manajemen ataupun jasa pelayanan air dari entitas publik kepada swasta. Menurut Gleick, dalam prakteknya privatisasi air yang diorganisir oleh swasta memiliki beberapa prinsip dan standar yang harus diperhatikan, diantaranya: tetap mengelola air sebagai public goods, yaitu dengan memenuhi kebutuhan dasar manusia, dan memenuhi kebutuhan ekosistem alami akan air dalam setiap proses privatisasi yang terjadi. Kenaikan harga air harus dihubungkan dengan peningkatan pelayanan yang telah disepakati bersama. Ketika kenaikan harga dihubungkan dengan peningkatan pelayanan, pengelola air akan memiliki insentif untuk meningkatkan nilai air dan penyediaan akan air.⁵⁴

Menurut World Bank, pengelolaan air yang buruk oleh Negara menyebabkan buruknya kualitas dan rendahnya penetrasi sistem pengelolaan air di seluruh dunia. Hanya dengan mengurangi peran pemerintah maka Negara kemudian dapat mengalokasikan sumber daya bagi aktivitas prioritas utama, mengusahakan pelayanan yang lebih murah dan berkualitas, serta membuka kesempatan bagi keterlibatan pihak swasta.⁵⁵ Pelaksanaan privatisasi air, yang diartikan sebagai perubahan kepemilikan perusahaan pengelolaan air dari milik Negara menjadi monopoli swasta, kemudian menjadi salah satu resep kebijakan yang gencar dipromosikan World Bank.

⁵² Benjamin Kohl dan Linda Farthing, *op. cit.*, hlm. 162.

⁵³ Pemegang saham utama perusahaan adalah Lyonnaise Des Eaux dengan saham sebesar 35%. Lihat "Gover Barja, David McKenzie, dan Miguel Urquiola", *loc. cit.*; lihat juga Public Citizens, "Water Privatization Case Study: Chocabamba, Bolivia"; diperoleh dari [http://www.tradewatch.org/documents/Bolivia_\(PDF\).PDF](http://www.tradewatch.org/documents/Bolivia_(PDF).PDF); Internet; 24 Agustus 2008.

⁵⁴ Peter Gleick, *The Worlds Water 2004-2005* (Washington: Island Press, 2004), hlm.1

⁵⁵ World Bank, *The State in a Changing World: World Development Report* (Oxford: Oxford University Press, 1997), hlm.61-62.

BAB 3

RESPON GERAKAN SOSIAL PASCA KEBIJAKAN EKONOMI BARU DAN PELARANGAN KOKA

Gerakan sosial terbentuk dari pertemuan berbagai perlawanan dan protes sosial atas kebijakan ekonomi politik pemerintah Bolivia yang menganut strategi Neoliberalisme. Penting untuk melacak kembali bagaimana reaksi terhadap berbagai kebijakan rejim Neoliberal berpengaruh terhadap pembentukan gagasan politik yang menjadi hegemoni tandingan dan juga terbentuknya formasi blok politik persatuan gerakan sosial.

3.1 Reaksi terhadap pelarangan koka

Dalam pengalaman gerakan sosial terdapat satu unsur yang unik dan nyaris tidak terdapat di Negara lain, yaitu bergabungnya petani tanaman koka yang dilarang dan diperangi karena sifatnya yang dapat dijadikan sebagai bahan baku pembuatan obat bius. Dalam pengalaman Bolivia pertemuan gerakan sosial yang memiliki tujuan anti neoliberalisme dengan petani koka sangat unik dan berperan penting bagi perjuangan di ranah politik.

3.1.1 Pembasmian ladang koka sebagai kebijakan sepihak

Pembasmian ladang koka yang dilakukan atas desakan AS memberikan tanggapan yang sangat serius bagi para petani koka, terlebih lagi dengan upaya AS mengagendakan perang terhadap narkoba dan koka menjadi bagian didalam agenda AS. Semenjak tahun 1980an, petani koka diharuskan mengganti hasil panen nya dengan tanaman alternatif atau lebih dikenal dengan pengembangan alternatif. Pemerintah Bolivia yang memberikan ruang perang terhadap peredaran narkoba ditahun 1997 berjalan dengan sangat efektif, akan tetapi perang terhadap narkoba ini tidak mengurangi peredaran koka sebagai bahan dasar kokain dan arus perdagangannya semakin meningkat. Kejadian ini sangat wajar mengingat penghasilan atas produksi koka sangat menguntungkan melebihi hasil panen lainnya.

Berbagai aksi penolakan dan perlawanan terhadap pembasmian koka dilakukan oleh para petani koka itu sendiri yang bermukim di daerah Chapare Chocabamba yang merupakan lahan subur bagi tumbuhnya koka dan merupakan produksi koka ilegal (kokain), kejahatan

kemanusiaan yang berkepanjangan sampai pada kegagalan pengembangan alternatif merupakan akibat yang disebabkan pemerintah Bolivia dan pihak asing (AS).¹

Permasalahan peredaran dan produksi koka datang ketika Hugo Banzer yang menjabat sebagai presiden Bolivia menjanjikan pemusnahan atas ladang koka kepada pemerintah AS, dalam pencapaian persetujuan perang terhadap arus peredaran koka. Banzer menggunakan kekuatan militer dalam upaya menghancurkan hasil pertanian koka ini, daerah Yungas bagian timur La Paz sekitar 30.000 *acres*.² Program yang lebih dikenal dengan *coca zero* ini telah membuat para petani koka yang sangat dirugikan sebagai kebijakan sepihak pemerintah. Pembasmian ladang koka telah menghilangkan mata pencaharian tradisional mereka selama beribu-ribu tahun, bahkan pembasmian ini telah menghasilkan kejahatan kemanusiaan dengan fakta bahwa banyaknya pembunuhan yang dilakukan pihak militer terhadap para petani koka.

3.1.2 Kegagalan “pengembangan alternatif” dan reaksi terhadap pelarangan koka

AS sebagai negara pengusung sekaligus penolak terhadap pertumbuhan koka di Bolivia melakukan upaya pengembangan alternatif dengan menggantikan pertumbuhan koka sebagai bahan baku kokain dengan hasil perkebunan lain. Dana sebesar US\$ 2 miliar yang dikeluarkan pemerintah AS dalam upaya memberantas produksi peredaran haram obat bius, dan dari dana ini pula program-program penyesuaian yang memberikan insentif kepada para petani untuk menanam hasil-hasil pertanian ekspor nontradisional, seperti lada, nenas, dan kacang.³

Pengembangan alternatif dikembangkan di Bolivia atas pengaruh yang diberikan pemerintah AS, pemerintah AS menekankan untuk meninggalkan *koka* dan memulai produksi tanaman pertanian alternatif. Permasalahan yang datang ketika pengembangan alternatif ini ditujukan kepada para petani *koka* yang telah merubah hasil pertaniannya adalah kesulitan akan pasar, penjualan hasil pertanian mereka mengalami berbagai masalah tidak

¹ Daerah Chapare merupakan daerah yang menjadi pertumbuhan subur ladang koka, setelah kokain mendapatkan hasil produksi dan keuntungan yang sangat menjanjikan bagi para petani, pertumbuhan koka meningkat sangat tajam. Para petani koka bukan hanya berasal dari daerah Chapare asli, daerah pedesaan Cochabamba dengan suku Quechuas, Aymara dari daerah *altiplano* tadinya bekerja sebagai pekerja tambang, dan penduduk lokal lainnya serta penduduk miskin perkotaan yang melihat bahwa Chapare menawarkan usaha yang dapat menghidupi kehidupan dan kebutuhan sehari-hari.

² Daerah Yungas timur merupakan salah satu daerah yang di legalkan pemerintah, dan masyarakat sekitar menggunakan hasil dari produksi koka untuk kebutuhan sehari-hari dan juga kebutuhan pengobatan. Lihat Benjamin Kohl dan Linda Farthing, *op. cit*, 151

³ Tony Avirgan, Laura Parsons, dan Ross Harmond, *op. cit*, hlm. 132.

seperti hasil produksi *koka*, selain itu mahal nya biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli pembasmi hama pestisida dan herbisida menjadi kendala para petani.

Salah satu petani koka bernama Zurita menambahkan kesulitannya dalam memasarkan hasil panen tanaman alternatif,

Kebijakan pembasmian koka (illegal) telah membuat hancur lima belas rumah *cocaleros* Kebijakan pengembangan alternatif yang dikembangkan tidak menghasilkan perubahan bagi kehidupan petani koka, tidak ada pasar untuk hasil dari pengembangan alternatif ini. Kebijakan pengembangan alternatif telah menjadi makna negatif dan kegagalan pemerintah terhadap para petani Bolivia⁴

Program pemberantasan dan produksi koka yang dilakukan pihak AS dengan dukungan kerjasama pemerintahan Bolivia telah mendatangkan berbagai permasalahan yang sangat besar. Pengangguran dan kejahatan kemanusiaan merupakan dua hal permasalahan yang datang dan dapat terlihat secara langsung sekaligus dirasakan oleh penduduk dan petani koka Bolivia.

Pelarangan terhadap koka tidak membuat produksi dan perdagangan koka menurun, perang terhadap arus narkoba di Bolivia telah gagal. Fakta ini diperkuat dengan meningkatnya produksi kokain, seiring dengan peningkatan kemiskinan yang melanda Bolivia. Selama tiga tahun setelah program NEP ditetapkan produksi koka meningkat 13 persen, lebih cepat dari hasil-hasil pertanian lainnya.⁵ Salah seorang petani mengatakan,

“Koka merupakan satu-satunya alternatif bagi saya. Saya tak bisa menjual pisang ke pasar, biarpun saya bisa mendapatkan harga yang lebih baik. Bagaimana lagi saya bisa memberi nafkah keluarga saya?”⁶

Salah satu pemimpin kaum tani Bolivia, Valentin Gutierrez menambahkan bahwa, kalimat ‘pengembangan alternatif’ sudah menjadi makna yang dangat negatif di Bolivia. Bukannya memberikan alat-alat atau bantuan teknis sesuai untuk meningkatkan produksi hasil-hasil pertanian tradisional, kebijakan AS berasumsi lain dengan mengharuskan mengekspor hasil-hasil pertanian lainnya.⁷ Perlawanan para petani dan pedagang koka menjadi tidak dapat dihindarkan.

⁴ Yasmin Khan, “The War of Cocaleros Has Brought Bolivia Nothing But Poverty and death: The Story of Leonilda Zurita Vargas”, dalam <http://www.narconews.com/Issue34/article1031.html>; internet; diakses 24 Agustus 2008

⁵ Tony Avirgan, Laura Parsons, dan Ross Harmond, *op. cit.*, hlm. 130.

⁶ *Ibid*, hlm. 131.

⁷ *Ibid*, hlm. 133.

Demonstrasi yang dilakukan para pedagang dan petani koka khususnya di Chapare tidak dapat dihindarkan lagi, kesatuan aparat polisi dan tentara dikerahkan pemerintah yang menyatakan Negara dalam keadaan darurat perang, didaerah yang merupakan pertumbuhan terbesar produksi koka.⁸

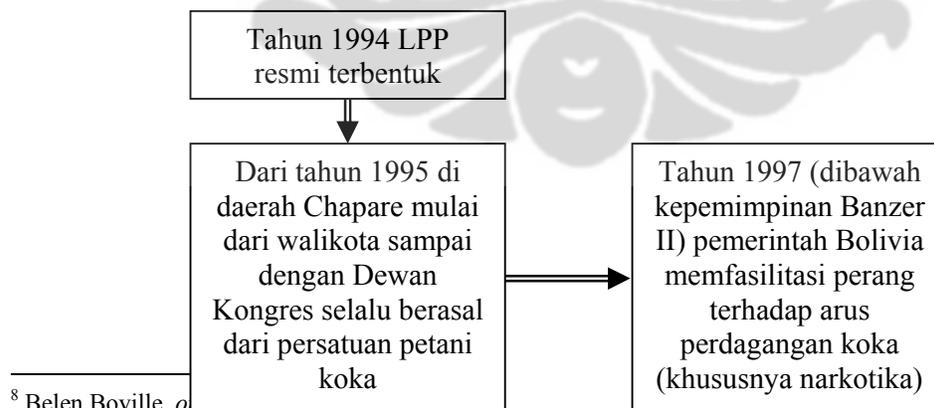
Salah satu faktor peningkatan jumlah produksi koka adalah banyak para tenaga kerja tambang yang terkena imbas pemutusan hubungan kerja akibat dari program privatisasi pemerintah secara sepihak, para pekerja tersebut beralih profesi dari pekerja tambang menjadi petani dan pedagang koka yang dianggap dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka.

Privatisasi air yang dilakukan di daerah Cochabamba yang menghasilkan pemutusan kontrak dengan pihak asing telah memberikan inspirasi bagi para petani koka untuk melakukan berbagai macam perlawanan yang diakibatkan pelarangan disertai dengan pembasmian ladang koka. Tepatnya di Chapare dengan berkoordinasi bersama federasi persatuan para guru yang terdapat didaerah perdesaan dan perkotaan untuk melakukan aksi penolakan terhadap undang-undang tentang penghapusan tanaman koka.

Posisi para petani koka diperkuat dengan banyaknya organisasi ditingkat akar rumput yang membentuk organisasi-organisasi, dan federasi untuk membentuk aspirasi mereka terhadap kebijakan pemerintah pusat,

Komunitas petani yang ada di Chapare, menyadari bahwa untuk melawan kebijakan yang ingin menghentikan peredaran koka maka mereka harus bersatu di dalam bentuk konfederasi pekerja yang dapat mereka gunakan sebagai kelompok yang kuat – sekitar tahun 1960-1970an tercatat enam federasi petani koka yang dibentuk, sekitar tahun 1980an penambahan petani koka diperkuat dengan bergabungnya mantan pekerja tambang yang tergusur akibat privatisasi – memasuki tahun 1990an gerakan petani koka telah menyadari perlunya mereka untuk berperan secara politik.⁹

Bagan 1 Proses pembentukan LPP



⁸ Belen Boville, *o*

⁹ Leonardus Satrio Wicaksono, "Pengaruh Politisasi Gerakan Sosial terhadap Kultur Demokrasi: Analisa Komparatif terhadap Gerakan MBR-200 di Venezuela dan Gerakan MAS di Bolivia," (Skripsi Sarjana Reguler Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2007), hlm. 87-88

Dari bagan diatas ketika LPP dibentuk pada tahun 1994 posisi dari petani koka cukup kuat bahkan dengan adanya LPP ini pula kekuatan organisasi ditingkat akar rumput telah memposisikan organisasi petani koka untuk dapat berpartisipasi atau memiliki *bargaining position* yang cukup kuat ditingkat daerah (walikota). Bahkan dengan adanya LPP ini mulai tahun 1995 kesadaran para petani dan pedagang koka untuk berserikat dalam memperoleh proses pengambilan kebijakan melalui pembentukan LPP telah mengangkat organisasi-organisasi lokal di tingkat daerah untuk menjadi lembaga formal dan menjadi bagian dari OTB. Hal ini diperkuat dengan pemilihan di daerah Chapare pada tahun 1995 dimulai dari walikota sampai dengan anggota dewan kongres daerah semuanya berasal dari federasi atau organisasi petani koka.¹⁰

Pembentukan LPP yang ditujukan memaksimalkan partisipasi lokal (khususnya petani koka) dimasa pemerintahan menimbulkan pertanyaan ketika kebijakan pembasmian koka (1997) dibentuk oleh pemerintahan dimasa Banzer. Para petani dan pedagang koka menjadi tersudutkan dan menjadi sasaran kebijakan yang sangat tidak menguntungkan. Perlawanan petani dan pedagang koka melalui *cocaleros* dan *campesino* menjadi semakin kuat dengan terbentuknya federasi atau organisasi untuk menyalurkan aspirasi mereka, pada situasi ini MAS sebagai elemen yang menjadi kendaraan politik Morales berhasil mengakomodir kehadiran para petani dan pedagang koka yang semakin tersisihkan dengan adanya pengembangan alternatif yang ditujukan untuk menggantikan produksi koka. Dibawah pemerintahan Banzer yang kedua ini pula popularitas Morales dan MAS sebagai kendaraan politiknya menjadi semakin besar.

3.2 Reaksi gerakan sosial terhadap privatisasi perusahaan air negara (SEMAPA)

3.2.1 Privatisasi air dan dampaknya

Setelah Banzer memfasilitasi AS dalam pembasmian koka, kebijakan Banzer yang menjadi isu besar berikutnya adalah penjualan perusahaan air Negara SEMAPA. Penjualan perusahaan air negara ini telah mendapatkan tanggapan yang beragam, pelaku kritis menyebutkan bahwa penjualan perusahaan negara telah menyebabkan permasalahan yang

¹⁰ Benjamin Kohl dan Linda Farthing, *op. cit.*, 157

cukup besar. Dari sisi sosial terjadinya kesenjangan dan kesejahteraan rakyat adalah dampak negatif yang diakibatkan dari proses privatisasi.

Kegagalan lain adalah peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi bagi Bolivia, dan menyebabkan kurangnya lapangan kerja.¹¹ Hampir di seluruh wilayah Amerika Latin (termasuk Bolivia) permasalahan privatisasi telah menghilangkan kesempatan lapangan kerja semenjak tahun 1990an.¹² Dalam hal penyesuaian harga kasus privatisasi perusahaan air minum telah mengalami peningkatan harga melebihi batas yang tidak dapat ditolerir lagi.

Dalam kasus privatisasi air, kenaikan harga menjadi hal yang sangat menarik karena dengan adanya peningkatan akan tarif air telah menggambarkan kegagalan privatisasi yang sangat “spektakuler”. Berkenaan dengan peningkatan tarif, Bank Dunia bersikeras bahwa pengelolaan air harus dilakukan dengan membayar harga *full cost recovery*¹³ dan tanpa diberikannya subsidi oleh pemerintah. Mengingat air adalah kebutuhan yang sangat vital bagi setiap manusia maka kebijakan Bank Dunia akan sangat berdampak negatif bagi masyarakat Bolivia, sebagai salah satu negara miskin di dunia kebijakan yang didorong oleh Bank Dunia akan menambah tingkat kemiskinan di Bolivia bertambah.

Di Cochabamba, krisis air terjadi dengan banyaknya masyarakat miskin kehilangan akses air bersih, sementara subsidi pemerintah diperuntukkan bagi kelas menengah dan sektor industri.¹⁴ Hal yang sangat ironi mengingat air dijadikan bahan komersial yang dapat diperjualbelikan bukan diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat. Berdasarkan data yang ada, sebesar 35% tarif akan air mengalami peningkatan yang diasumsikan kenaikan mencapai \$ 20.¹⁵

Berdasarkan hasil yang ada, banyak penduduk hanya mendapatkan akses akan air sekitar dua jam dalam sehari. Tidak adanya tekanan akan air. Rakyat harus menggunakan ember untuk mendapatkan air untuk keperluan sehari-hari. Dalam beberapa kasus, Sebagai salah satu contoh, seorang pensiunan guru yang

¹¹ Sebagai contoh, perusahaan penerbangan LAB Bolivia yang dijual kepada VASP telah membuka lapangan kerja baru secara besar di Seattle (AS) daripada lapangan kerja di Bolivia. Lihat *Ibid*, hlm. 112.

¹² Christopher Sabatini dan Eric Farnsworth, “The Urgent Need for Labor Law Reform”, *Journal of Democracy*, Vol 17, No. 4, Oktober 2006

¹³ *full cost recovery* yang berarti pengguna air akan dibebankan biaya yang mencakup biaya sistem pengelolaan air, yang didalamnya termasuk biaya operasional, pemeliharaan, dan pengeluaran modal, kondisi yang terjadi di Bolivia dipersulit dengan biaya yang akan dibebankan untuk membayar hutang masa lalu perusahaan SEMAPA.

¹⁴ “Gover Barja, David McKenzie, dan Miguel Urquiola”, *loc. cit*

¹⁵ Evo Morales, “From Coca to Congress”, dalam <http://www.zmag.org/znet/viewArticle/11408>; internet; diakses 21 Mei 2009

berpenghasilan \$80 dalam sebulan, membayar tagihan air yang awalnya hanya membayar \$5 setelah privatisasi mencapai \$25.¹⁶

3.2.2 Tanggapan terhadap privatisasi air di Cochabamba

Privatisasi perusahaan air negara (SEMAPA) kepada pihak Aguas del Tunari telah mendatangkan reaksi rakyat Bolivia dengan berbagai aksi penolakan terhadap harga air yang melambung tinggi, Aguas del Tunari memiliki hak penuh untuk mendistribusikan sistem pengairan di Cochabamba dan sumur yang dimiliki warga pedesaan (dikelola secara mandiri) menjadi bagian dari pengambilalihan sarana kebutuhan akan air menjadi sepenuhnya milik pihak Aguas del Tunari. Air telah menjadi barang yang sangat langka khususnya yang berada di daerah perbatasan, akses kebutuhan akan air menjadi sangat terbatas bahkan dapat dikatakan dalam memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari sangat sulit untuk dipenuhi.¹⁷

Sebelum SEMAPA diprivatisasi rakyat telah melakukan bentuk protes untuk menghindarkan penjualan perusahaan negara ini, rakyat menghimbau bahwa kebutuhan akan air bersih merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat digantikan dengan apapun, pada tahun 1997 dalam usaha melindungi hak kebutuhan rakyat akan air bersih serta mengantisipasi penjualan SEMAPA terbentuk komite yang diberi nama CODAEC (*Comite para la Defensa del Agua y la Economia Familiar*), komite ini terdiri atas FEDECOR (*Federation of Irrigation's Association from the Department of Cochabamba*), berbagai macam komite air kota, persatuan delegasi peduli lingkungan (el Pueblo en Marcha – PUMA).¹⁸

Pada tahun 1999 setelah SEMAPA diprivatisasi, para petani, rakyat yang mengelola kebutuhan air bersih secara mandiri, bersama dengan pihak CODAEC melakukan bentuk perlawanan dengan menutup akses jalan dan melalui aksi demonstrasi di daerah sekitar Cochabamba sebagai aksi protes setelah disahkannya undang-undang *Water Law 2029*.¹⁹ Perlawanan yang dilakukan sebagai dampak pada tingginya tagihan akan air yang meningkat, serta akses akan air bersih yang sangat sulit didapat.

¹⁶ Multinational Monitor, "The Fight for Water and Democracy: An Interview With Oscar Oliviera", dalam <http://multinationalmonitor.org/mm2000/00june/interview.html>; internet; diakses 21 Mei 2009

¹⁷ Cochabamba dikenal dengan daerah *zona sur* (daerah selatan) yang merupakan daerah dengan penghasil sumber ekonomi sangat minim. khusus berkenaan dengan masalah sistem pengairan untuk kebutuhan air, masyarakat di daerah Cochabamba telah mengelola kebutuhan secara mandiri (hanya sedikit peran yang dilakukan pihak pemerintah), "Gover Barja, David McKenzie, dan Miguel Urquiola", *loc. cit*

¹⁸ Benjamin Kohl dan Linda Farthing, *op. cit*, hlm. 163.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 164.

INRA yang menjadi kebijakan yang ditujukan dan diciptakan untuk para penduduk asli sebagai pemilik tanah sekaligus memberikan perlindungan yang layak menjadi kebijakan yang tidak terealisasi, hal ini tergambar melalui peran air sebagai sumber kehidupan rakyat Bolivia yang dijadikan barang komoditi bahkan dengan meningkatnya tagihan tarif air memberikan kondisi yang tidak juga membaik.

Pada tahun 2000, Komite koordinasi (Coordinadora de Defensa del agua y de la Vida – Coordinadora) terbentuk bersama dengan kesatuan CODAEC, isu politik dan sosial yang ditanamkan adalah menyangkut “air untuk kehidupan” yang diperuntukkan rakyat Bolivia khususnya daerah Cochabamba dengan sulitnya akses rakyat akan air serta tingginya tagihan air semenjak SEMAPA diprivatisasi.

Pembentukan Coordinadora dianggap hanya sebagai organisasi informal, gerakan koalisi yang tidak legal dimata rezim politik Bolivia. Berdasarkan konstitusi Negara untuk berhubungan dengan Coordinadora karena Coordinadora berada di luar institusi. Meski demikian dibawah tekanan mobilisasi dan legitimasi yang dimiliki kelompok pengusung, pemerintah dipaksa untuk mengakui kehadiran Coordinadora dan bernegosiasi dengan kelompok tersebut.²⁰

Kekuatan dan keberadaan Coordinadora mengilustrasikan keinginan rakyat yang cukup kohesif untuk berkembang dari dalam bila diberikan sumber daya yang memadai. Saat ini Coordinadora telah memberikan referensi dan menjadi bagian penting dari perkembangan kelompok organisasi sosial yang memungkinkan penguatan aspirasi masyarakat melawan pemerintah.

Coordinadora sendiri terbentuk dari bermacam koalisi yang menghargai perbedaan gender dan ras, hal ini dapat terlihat dari peran penting para wanita yang tergabung dalam aksi perlawanan dan demonstrasi yang terjadi. Disamping itu petani lokal (yang diantaranya para petani koka), para pemimpin dari suku mestizo, dan “golongan kulit putih” yang berasal dari profesional perkotaan mengambil bagian dari proses perlawanan dan bertindak memimpin jalannya aksi. Koalisi juga terbentuk secara “*multi-class*” yang diantaranya terdiri dari kalangan profesional perkotaan, kesatuan para pekerja, dan pekerja informal yang

²⁰ Rieza Rahadian, “Interaksi Negara dengan Organisasi Internasional dan Perusahaan Multinasional dalam Privatisasi Air Cochabamba Tahun 1999-2000 dan Implikasinya bagi Masyarakat Sipil,” (Skripsi Sarjana Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, 2005)

bergabung dengan para petani dari berbagai daerah.²¹ Selain koalisi dari berbagai lapisan rakyat, Evo Morales sebagai pemimpin dari kaum tani melalui *cocaleros* dan organisasi *campesino* mengambil bagian dalam aksi perlawanan terhadap privatisasi air.²²

“Semua orang tertuju ke plaza melakukan aksi demonstrasi mempertanyakan kontrak yang telah disepakati,” Fredy Villagomez mengatakan. “para pria tertuju pada pusat kota, mencoba untuk mempertahankan plaza. Yang lain mencoba untuk membentuk barikade di jalan. Banyak para *campesino* dan *cocaleros* mengambil bagian dalam aksi ini dengan berjalan menuju Cochabamba.” Para wanita dengan memakai topi jerami dan lipatan beludru yang terang dengan rambut hitamnya yang dikuncir ikut ambil bagian dalam aksi ini.²³

Dibulan Februari lebih dari 50.000 rakyat berpartisipasi dalam aksi protes secara damai dengan memblokir dan mematikan kegiatan kota selama lebih dari 24 jam. Walaupun aksi dilakukan secara damai, pihak pemerintah dengan bantuan aparat kepolisian melancarkan bentuk perlawanan dengan kekerasan, ratusan orang terluka dalam aksi ini. Sementara perwakilan *Coordinadora* berhasil mencapai beberapa kesepakatan dengan pemerintah, yang diantaranya pemerintah diharuskan mengembalikan tarif tagihan air pada level semula dalam jangka waktu dua bulan dan ketentuan perundang-undang yang baru berkenaan kebutuhan akan sumber air bagi rakyat.²⁴

Setelah batas waktu selama dua bulan, pemerintah tidak memedulikan kesepakatan yang telah dibuat, aksi gerakan sosial rakyat tidak bisa terhindarkan lagi, seketika demonstrasi rakyat semakin membesar mempertanyakan kebijakan pemerintah yang sangat merugikan, lebih dari 100.000 ribu rakyat memadati jalan di Cochabamba yang dikoordinasi pihak *Coordinadora* dan berbagai koalisi yang tergabung dalam aksi ini. Presiden Banzer (sebagai presiden dimasanya) mengisyaratkan “Negara dalam keadaan perang”.²⁵

Tekanan rakyat yang semakin membesar disertai aksi perlawanan memaksa Banzer untuk mengikuti tuntutan rakyat. Pemerintah dan pihak *Coordinadora* akhirnya mencapai kesepakatan untuk membatalkan kerjasama dengan perusahaan *Aguas del Tunari*. Pada

²¹ Susan Spronk, “Roots of Resistance to Urban Water Privatization in Bolivia: The New Working Class, The Crisis of Neoliberalism, and Public Services”, dalam <http://www.socialsciences.cornell.edu/0609/ILWCH.pdf>; internet; diakses 24 Agustus 2008

²² “Evo Morales”, *loc. cit*

²³ William Finnegan, “Leasing the Rain”, dalam <http://www.waterobservatory.org/library.cfm?refID=33711>; internet; diakses 21 Mei 2009

²⁴ “Susan Spronk”, *loc. cit*

²⁵ Setelah kesepakatan dibatalkan dan rakyat kembali melakukan aksi protes lebih dari ratusan orang terluka, Oscar Olivera sebagai pimpinan *Coordinadora* ditahan pihak kepolisian beserta para protes yang lain. *Ibid*

tanggal 11 April pemerintah mengeluarkan keputusan undang-undang *Water Law* (2066) atas hak rakyat untuk mendapatkan kebutuhan air bersih.

Kasus di Cochabamba telah memberikan inspirasi perlawanan terhadap privatisasi perusahaan air negara berikutnya di daerah perkotaan El Alto pada tahun 2005. Kontrol perusahaan air Negara oleh pihak dari Perancis dengan nama perusahaan Aguas del Illimani di tahun 1997 atas hak pengelolaan air di daerah El Alto memberikan protes keras masyarakat yang terpinggirkan untuk mendapat hak nya berkenaan dengan kebutuhan akan air.

El Alto yang merupakan daerah dengan penduduk termiskin di Bolivia mendapatkan imbas nya dengan adanya privatisasi air ini, bentuk perlawanan yang cukup besar dilakukan rakyat terlebih lagi peran organisasi FEJUVE (*the Federation of Neighborhood Councils of El Alto*) yang melakukan aksi mobilisasi rakyat. Pembentukan FEJUVE sendiri terdiri dari 500 organisasi akar rumput yang berada pada tingkatan terendah basis rakyat (akar rumput),²⁶ FEJUVE dengan pemimpinnya Abel Mamani juga mengambil bagian dari aksi menentang privatisasi hidrokarbon bersama dengan gerakan-gerakan serta organisasi lainnya.

3.3 Reaksi terhadap privatisasi hidrokarbon serta jatuhnya rezim neoliberalisme

Setelah privatisasi air yang berujung pada pemutusan kontrak terhadap pihak perusahaan asing Aguas del Tunari, perlawanan rakyat kembali terjadi mempertanyakan privatisasi hidrokarbon yang dilakukan dimasa pemerintahan Goni (1993-1997) dan dilanjutkan kembali sebuah proyek eksplorasi hidrokarbon dimasa pemerintahan Goni kedua (2002-2003).

Sebelum dilakukan privatisasi seluruh kegiatan industri hidrokarbon berada dalam kontrol dan pengawasan perusahaan negara YPFB. Dengan adanya proses kapitalisasi, undang-undang atas hidrokarbon diperkenalkan, prioritas utama adalah menggantikan kegiatan produksi dari YPFB dan mempromosikan kegiatan ekspor yang ditujukan ke bagian selatan Brasil. Fokus tujuan kegiatan privatisasi ini adalah perbaikan dan investasi asing, dalam urusan yang menyangkut eksplorasi dan pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan pembangunan saluran pipa menuju Brasil. Kegiatan perbaikan yang dilakukan merupakan usaha meningkatkan cadangan gas alam.²⁷

²⁶ *Ibid*

²⁷ "Gover Barja, David McKenzie, dan Miguel Urquiola", *loc. cit*

Kegiatan eksplorasi cadangan minyak di Bolivia telah mengalami peningkatan, dari 5,7 triliun kubik ditahun 1997 menjadi 52,3 triliun kubik di tahun 2002, usaha ini mengedepankan Bolivia berada pada posisi terdepan di Amerika Latin menyangkut perolehan cadangan gas alam.²⁸

Setelah NEP diberlakukan melalui dekrit presiden 21060 dan dampak terhadap ekonomi Bolivia yang tidak stabil, perlawanan masyarakat melalui gerakan sosial mulai terlihat. Tingkat pengangguran yang semakin meningkat menambah daftar panjang kehadiran elemen masyarakat yang tidak membaik dalam hal keadilan dan kesejahteraan yang ada.

Pada tahun 2002, Goni yang kembali terpilih sebagai presiden (masa kepemimpinan Goni kedua) dan pemerintahannya mengeluarkan suatu kebijakan dengan melakukan penjualan industri gas yang terdapat di daerah Tarija.²⁹ Usaha eksplorasi tambang gas di Bolivia sudah direncanakan di masa presiden Jorge Queroga di tahun 2002 dimana saat itu telah dibentuk sebuah konsorsium pertambangan yang disebut Pasific LNG dengan anggota Repsol YPF, British Gas, dan Pan American Energy. Konsorsium ini sepakat dengan melakukan eksplorasi di daerah Tarija dan mengirimkan hasilnya untuk diperdagangkan di pasar Meksiko dan California (AS). Konsorsium ini setuju untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan Sempra Energy untuk kegiatan pendistribusian gas Bolivia di pasar Amerika Latin.

Dimasa pemerintahan Goni, negosiasi proyek eksplorasi gas ini mencapai kesepakatan mengenai pengiriman gas melalui pipa yang dibangun melewati daerah Chili. Pengembangan proyek gas melalui eksplorasi cadangan gas alam telah mendapatkan protes keras dari seluruh lapisan masyarakat yang menentang privatisasi gas, kemudian protes-protes dan aksi penentangan membuat masyarakat yang tidak setuju mengambil bagian dalam bentuk perlawanan.

Berbagai aksi penolakan penjualan gas sebagai sumber alam Bolivia mendapatkan dukungan dari pihak oposisi (lihat lampiran pemilu 2002), yang tidak lain adalah MAS dengan Morales sebagai pemimpin partai “kiri”. MAS dan Morales memposisikan diri untuk berjuang mendukung usaha gerakan sosial dalam penentangan penjualan gas Bolivia.

Setelah gerakan sosial yang berujung pada perlawanan privatisasi perusahaan air negara (SEMAPA) dan pembentukan Coordinadora, sebuah badan koordinasi perlindungan

²⁸ *Ibid*

²⁹ Bolivia adalah salah satu Negara dengan cadangan industri gas minyak bumi yang terbanyak dan terbesar kedua di Amerika Latin setelah Venezuela.

gas (National Coordinator for the Defence and Recovery of Gas – NCDRG) dibentuk dan berfungsi untuk melakukan koordinasi penolakan terhadap penjualan dan privatisasi gas. Bukan hanya dalam tahapan teori, NCDRG yang berbentuk badan ini melakukan aksi mobilisasi massa, 50.000 orang melakukan aksi protes di daerah distrik La Paz dan 20.000 orang di daerah Chocacamba melakukan aksi yang serupa. Bentuk protes ini bukan hanya dilakukan oleh pihak NCDRG dan MAS, perkumpulan penduduk asli terutama dari suku Aymara dan Chequa juga memobilisasi pendukungnya untuk melakukan aksi yang sama, menentang penjualan dan privatisasi gas.³⁰

Juli 2002 gerakan sosial semakin membesar dalam upaya penolakan privatisasi gas, dua puluh satu organisasi tergabung dalam satu kesatuan (NCDRG) yang dipimpin oleh Morales dan Filemon Escobar (Senator terpilih MAS). Kesatuan dalam satu organisasi perlawanan ini termasuk didalamnya para pemimpin militer, massa anti-globalisasi, para aktivis, *Juntas Vecinales*, pensiunan tahunan dan veteran, *union representatives*, campesino yang berada di dataran tinggi, dan penanam koka.³¹ Mobilisasi massa yang dilakukan semakin menguatkan keberadaan gerakan sosial di Bolivia dengan mengangkat permasalahan privatisasi, keberadaan gerakan sosial semakin tertuju kearah yang massif.

Berbagai aksi penolakan dilancarkan para petani, buruh tambang, dan berbagai elemen masyarakat di Bolivia, salah satu organisasi yang menentang kebijakan pemerintah adalah Konfederasi Serikat Buruh *Campesino* Bolivia (Confederacion Sindical Unica de Trabajadores – CSUTCB), perlawanan dan penentangannya terhadap kebijakan dan pengaruh asing (AS) sampai pada permasalahan kepemilikan tanah merupakan agenda perjuangan yang dititikberatkan CSUTCB sebagai bagian perlawanan para buruh.

Perlawanan terhadap privatisasi semakin membesar aksi demonstrasi semakin meluas, Felipe Quispe sebagai pimpinan CSTUCB memberikan seruan untuk melakukan aksi mobilisasi massa secara nasional, suku Aymara yang mendiami *altiplano*³² disekitar La Paz dan para petani penghasil koka di Chapare mengambil bagian dalam melancarkan aksi demonstrasi. Aksi yang serupa terjadi di Cochabamba, Evo Morales memimpin aksi pemblokiran jalan dan demonstrasi secara besar-besaran yang dilakukan para petani penanam koka, aksi ini didukung penuh oleh Coordinadora yang merupakan bagian dari perlawanan

³⁰ Benjamin Kohl dan Linda Farthing, *op. cit.*, hlm. 173.

³¹ *Ibid*, hlm. 173-174.

³² *Altiplano* adalah plato dataran tinggi yang membelah pegunungan Andean, dan memiliki ketinggian lebih dari 3.600 meter (11.880 kaki) berada diatas permukaan laut. *Ibid*, hlm. 58

privatisasi perusahaan air negara. Kelompok lain menyeragamkan aksi yang serupa, seperti pihak COB dengan para buruh pabriknya melakukan aksi pemogokan umum. Aksi demonstrasi dan protes-protes seketika berubah menjadi aksi kekerasan dan penghancuran sarana umum.³³ Aksi gerakan sosial memaksa Goni turun dari jabatan kepresidenan dengan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden Carlos Mesa. Setelah naiknya Mesa sebagai presiden, Mesa menjanjikan pelaksanaan suatu referendum untuk menangani isu gas Bolivia dan juga menunjuk beberapa orang pribumi untuk masuk kedalam pos kabinetnya.

Berbagai elemen organisasi seperti COR (*Confederacion de Obreros Regionales*), FEJUVE, UPEA (*El Alto Public University*), COB, CSTUCB, dan NCDRG, mempertanyakan referendum yang telah disepakati Mesa, berbagai organisasi dan lapisan masyarakat tersebut menuntut wacana nasionalisasi. Menurut pemimpin dari gerakan sosial, penawaran referendum yang akan dikeluarkan oleh Mesa hanya untuk membentuk popularitas Mesa saja, dan Mesa pun pada akhirnya telah gagal merealisasikan referendum undang-undang hidrokarbon yang diterapkan di masa pemerintahan Goni pada 1997.³⁴

Pada tanggal 18 Juli 2004, Mesa mulai memasukkan wacana nasionalisasi pada daftar referendum kongres Bolivia. Referendum yang ditujukan untuk meninjau ulang kebijakan hidrokarbon no.1689 dimana berdasarkan referendum tersebut, kongres Bolivia meluluskan sebuah kebijakan hidrokarbon yang baru dengan memberlakukan pajak tambahan sebesar 32% serta royalti sebesar 18%, yang menghasilkan total 50% royalti dan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan asing. Akan tetapi setelah persetujuan peraturan itu disepakati, Mesa gagal untuk menjalankan ataupun memveto kebijakan. Perkembangan dalam ketidakjelasan semakin menimbulkan mosi ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan yang dijalankan Mesa. Tekanan rakyat selama kebijakan privatisasi gas membawa Mesa dalam situasi yang berat, tuntutan rakyat disertai aksi perlawanan secara besar-besaran di La Paz mengantarkan Mesa untuk mengundurkan diri pada bulan juni 2005.³⁵ Naiknya Mesa sebagai presiden Bolivia telah meredakan sementara konflik sosial dan tuntutan rakyat, namun masih gagal untuk menyelesaikan pertentangan antara pendukung dan penentang dominasi peran perusahaan asing disektor energi Bolivia.

³³ *Ibid*, hlm. 167.

³⁴ Forrest Hylton, "The Ghost of Gonismo: Popular Participation in Bolivia's Gas Referendum", dalam <http://www.counterpunch.org/hylton07202004.html>; internet; diakses 19 Mei 2009

³⁵ Pengunduran Mesa sebagai presiden merupakan untuk kedua kalinya, setelah dibulan Maret mendapat penolakan atas pengunduran diri dari kongres, dan digantikan oleh presiden dari Mahkamah Agung Bolivia Eduardo Rodriguez sebagai pengisi kedudukan sementara sampai dijalankannya pemilu ditahun 2005. Robert E. Quirk, *op. cit*, hlm. 125-126.

BAB 4
ANALISA KEBERHASILAN GERAKAN SOSIAL DALAM MENENTANG
PRIVATISASI AIR DAN HIDROKARBON SERTA PEMBASMIAN
KOKA DI BOLIVIA TAHUN 1985-2006

4.1 Peranan mobilisasi, *framing*, dan struktur peluang politik (POS)

Pembentukan LPP telah membantu perkembangan organisasi-organisasi akar rumput (seperti *cocaleros* dan organisasi akar rumput lainnya) yang selama ini tersisihkan melalui program desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, melalui LPP ini pula masyarakat asli (sebagian besar suku Indian) dan pemerintah daerah yang selama ini tersisihkan dari proses politik maupun ekonomi mendapatkan bagian yang lebih besar dalam penentuan kebijakan yang akan dijalankan. Akan tetapi permasalahan muncul ketika bentuk organisasi seperti apa yang bisa menjadi bagian OTB. Seperti pembentukan Coordinadora, pemerintah menganggap pembentukan Coordinadora merupakan organisasi informal yang tidak diakui keberadaannya di lingkungan politik formal. Akan tetapi tuntutan rakyat yang sangat besar telah berhasil dengan terbentuknya Coordinadora sebagai suatu wadah yang merepresentasikan keinginan rakyat akan air bersih.

Pembatalan kebijakan privatisasi air dimungkinkan oleh framing situasi yang menterjemahkan reaksi terhadap kebijakan ekonomi baru sebagai wacana yang diusung oleh gerakan sosial melalui perlawanan rakyat telah berhasil menjatuhkan kekuatan yang telah mapan. Isu dengan mengangkat “air sebagai sumber kehidupan” dapat dikatakan berhasil dalam menjaring massa yang besar melalui aksi perlawanan, yang sebelumnya terjadi pengkotak-kotakan isu publik seperti mengatasmakan kesejahteraan buruh pekerja tambang, permasalahan kesejahteraan pekerja di perkotaan, buruh pabrik ataupun permasalahan lain yang semuanya hanya mengakomodir beberapa golongan tertentu.

Dalam kasus perlawanan terhadap privatisasi air yang dilakukan oleh organisasi seperti Coordinadora, Coordinadora bukan mengorganisir dibawah bendera serikat buruh dengan mengatasmakan atau yang berhubungan dengan masalah pekerja dan tenaga kerja “worker’s issues” akan tetapi berhubungan dengan kondisi kehidupan “neighborhood issues”, dalam hal ini Susan Spronk menyebutnya sebagai kelas pekerja baru “new working class”.¹

¹ “Susan Spronk”, *loc. cit*

Apa yang disebutkan McCarthy sebagai struktur informal, Coordinadora sebagai lembaga informal menjadi kontributor penting munculnya gerakan perlawanan, hal ini dapat dilihat ketika perlawanan telah berhasil membatalkan kontrak privatisasi air perusahaan asing, gerakan-gerakan lain muncul dan berkembang membentuk suatu perlawanan pasca keberhasilan privatisasi air di Cochabamba.

Menyangkut lembaga formal melalui pembentukan LPP walaupun dalam proses implementasi LPP tidak terlepas dari permasalahan, akan tetapi dengan LPP ini organisasi-organisasi formal dapat memosisikan sekaligus menjadi basis kekuatan organisasi di tingkat akar rumput. Seperti yang dikatakan Rucht berkenaan dengan model organisasi formal akar rumput, bahwa model organisasi formal akar rumput ini mampu menjadi pelaku politik yang radikal dan berkomitmen tinggi terhadap gerakan.² Para petani dan pedagang koka yang notabene berasal dari tingkat akar rumput telah menjadi kekuatan yang radikal. Disamping itu, setelah banyaknya pemutusan hubungan kerja terhadap para pekerja tambang akibat dari privatisasi dan keadaan ekonomi yang semakin terpuruk melanda Bolivia, banyak pekerja tambang yang beralih profesi menjadi pedagang koka (baik legal ataupun illegal) membuat posisi kesatuan pedagang dan petani koka semakin besar. Hal ini terbukti dengan gagalnya pemerintah untuk mengembangkan kebijakan alternatif untuk mengganti produksi koka.

Secara singkat faktor yang dikedepankan sebagai struktur peluang politik yang berbasiskan akar rumput telah menjadi pelaku yang radikal antara lain;

1. keadaan ekonomi dan politik pasca penerapan NEP
2. pembentukan LPP tahun 1994,³ disertai kebijakan pembasmian koka tahun 1997.

Kedua elemen atau faktor ini yang menjadi pondasi dasar kebangkitan aktor-aktor politik gerakan sosial yang semakin membesar, dapat dikatakan juga bahwa kedua faktor ini telah memacu perkembangan perlawanan melalui gerakan sosial dengan memanfaatkan sumber daya eksternal melalui struktur peluang politik yang telah ada.

² Lihat kembali pemaparan kerangka teori BAB1.

³ Lihat pemaparan penjelasannya pada BAB 2

4.2 Perkembangan kemenangan MAS dan Morales sebagai blok anti neoliberalisme di Bolivia

Tabel 3 Masa pemerintahan dan kebijakan yang menjadi permasalahan

Pemerintahan dan periode menjabat	Kebijakan	Tahun pembentukan	Keterangan	Dampak Kebijakan
Paz Estensorro 1985-1989	Penerapan SAP, melalui NEP	1985		Masuknya barang impor menimbulkan persaingan yang dengan ketidaksiapan para petani lokal menghadapi arus perdagangan internasional
Gonzalo Sanchez Lozada (pertama) 1993-1997	- Pembentukan LPP - Pembentukan INRA - Privatisasi Hidrokarbon	- 1994 - 1996 - 1997	Lihat tabel 2 penjualan perusahaan Negara untuk lebih lengkapnya	Dengan terbentuknya LPP partisipasi politik ditingkat akar rumput menjadi maksimal.
Hugo Banzer 1997-2001	- Undang-undang <i>War on Drugs</i> 1008 - Privatisasi Air	- 1997 - 1999	- Pemerintahan Banzer memfasilitasi kebijakan AS untuk memerangi arus narkotika - Perusahaan air SEMAPA dijual kepada Aguas del Tunari	- perlawanan para petani dan pedagang koka akibat pembasmian koka secara sepihak - respon gerakan sosial terhadap privatisasi air di Cochabamba sekaligus keberhasilan gerakan sosial
Gonzalo Sanchez Lozada (kedua) 2002-2003	eksplorasi privatisasi Hidrokarbon	2002	Lihat penjelasan pada BAB3, tanggapan terhadap privatisasi gas	Respon gerakan sosial dan mundurnya Goni sebagai presiden ditahun 2003
Carlos Mesa 2003-2005	Referendum no. 1689 atas privatisasi Hidrokarbon	2004	Lihat sedikit penjelasan pada BAB3	Mengantarkan Mesa untuk mengundurkan diri sebagai presiden Bolivia
Eduardo Rodriguez 2005-2006	-	-	Presiden sementara (interim)	

Penekanan pembentukan blok historis yang diawali melalui struktur peluang politik (lihat alur berpikir), menjadi salah satu bentuk “me-manage” konflik atau perlawanan yang

dilakukan gerakan anti privatisasi dan anti neoliberalisme. Demikian pula melalui kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan dan memberikan dampak buruk bagi masyarakat dimasa rezim neoliberalisme (Estensorro, Goni, Banzer, dan Mesa) pada rentang waktu 1985 sampai dengan 2006 sebagai bentuk awal yang memacu perkembangan perlawanan melalui gerakan sosial.

Proses kebangkitan gerakan sosial dimulai ketika pada tahun 2000 terjadinya pemutusan kontrak terhadap privatisasi air yang dilakukan oleh perusahaan asing Aguas del Tunari di Cochabamba, dan dilanjutkan melalui perlawanan panjang atas privatisasi hidrokarbon dengan berhasil menjatuhkan rezim neoliberalisme (Goni dan Mesa). Kedua kasus privatisasi tidak terlepas dari peran badan koordinasi Coordinadora pada privatisasi air dan NCDRG pada privatisasi hidrokarbon, sedangkan posisi *cocaleros* pada kedua kasus privatisasi tersebut adalah dengan menempatkan atau mengambil bagian melalui proses perlawanan menentang privatisasi air dan hidrokarbon bersama dengan gerakan-gerakan anti privatisasi dan elemen masyarakat lainnya.

Kedua badan koordinasi adalah sebagai bentuk representasi dan bentuk penolakan terhadap privatisasi perusahaan negara, melalui kedua badan koordinasi tersebut berbagai elemen organisasi masyarakat bersatu dalam satu kesatuan untuk menempatkan isu privatisasi yang justru hanya menambah daftar panjang kesejahteraan rakyat yang semakin memburuk.

Disamping kebijakan privatisasi, kebijakan pemerintah (Banzer) atas pembasmian koka ditahun 1997 yang membuat posisi para petani dan pedagang koka menjadi tersudutkan akan tetapi dengan adanya LPP ini bentuk perlawanan dari *cocaleros* (produsen koka) telah meningkat bahkan menguatkan posisi *cocaleros* untuk lebih besar melakukan aksi perlawanan. Tekanan dari negara terhadap para petani dan pedagang koka kemudian menjadi penyebab dari proses radikal melalui perlawanan petani dan pedagang koka.

Perkembangan dari sejarah dua gerakan tersebut harus dilihat pada fenomena MAS sebagai instrument perlawanan para petani koka dan gerakan anti privatisasi yang membawa MAS sebagai mesin politik yang berhaluan “kiri”. Proses perkembangan MAS yang berbasiskan penduduk asli dengan mempunyai jaringan yang kuat untuk mengontrol dan mengkoordinasikan ditingkat daerah berkembang pesat menuju tingkat nasional.⁴

⁴ Proses perkembangan partai politik MAS hampir sama dengan Brazilian Worker's Party (PT), pergerakan melalui perlawanan yang dilakukan ditingkatan *grassroots* menuju tingkat nasional dengan bertransformasi menjadi partai politik. Lihat Jan Rocha, “Cutting the Wire: The Landless Movement in Brazil”, *Current History*, Vol, 102, No. 661, Februari 2003, hlm. 86-90.

Morales sebagai pimpinan MAS kembali melakukan bentuk perlawanan yang penuh dengan kekerasan terhadap keputusan presiden DS 26415 tentang penutupan atas produksi koka legal di Chapare, Usaha ini dilakukan sebagai salah satu bentuk kesempatan politik untuk meningkatkan popularitas Morales, akan tetapi disisi yang lain produksi koka di Chapare tersebut merupakan produksi koka legal yang merupakan mata pencaharian penduduk asli sekaligus dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Usaha pembentukan popularitas Morales sebelumnya telah dilakukan, sebagai contoh dalam usaha Morales mendapatkan dukungan politik di tingkat internasional, Morales melakukan kunjungan ke Kuba dan Venezuela dengan para pemimpin terkait. Hubungan sekaligus keterikatan Morales dengan pimpinan Kuba Fidel Castro dan pimpinan Venezuela Hugo Chavez telah tergambar ketika lawatan Morales menuju Kuba di tahun 1980 dengan agenda pemberian beasiswa akademis yang diperuntukkan para petani koka Bolivia sekaligus sebagai program pemberantasan buta huruf. Selain itu kedekatan hubungan dengan Hugo Chavez terjalin sejak tahun 2001, Hugo Chavez mendukung penuh partai MAS dan mengakui telah memberikan saran politik selama pemilihan presiden di Bolivia berlangsung, hal yang serupa dilakukan Hugo Chavez kepada presiden Chili terpilih Michelle Bachelet.⁵

Setelah pemilihan presiden terlaksana dan Morales tampil sebagai presiden, Morales melakukan kunjungan internasional untuk berterimakasih atas dukungan yang diberikan Fidel Castro dan Hugo Chavez. Kunjungan Morales kali ini menghasilkan beberapa kesepakatan, Hugo Chavez meningkatkan kesepakatan perjanjian dibidang kesehatan dan pendidikan, dan membuka kantor minyak nasional Venezuela (PDVSA) di Bolivia melalui kesepakatan perjanjian barang tambang minyak dan gas. Demikian halnya dengan pemimpin tertinggi Kuba, Fidel Castro, program pendidikan secara terpadu dan pemberian beasiswa kepada 5.000 pelajar Bolivia.⁶ Kesepakatan ketiga pemimpin semakin menguatkan posisi sentral keterbukaan Negara masing-masing khususnya dalam pembentukan aliansi Amerika Latin

Melalui semangat nasionalisme dan neoliberalisme yang merupakan elemen yang dikuatkan MAS dan Morales untuk “membangkai” isu besar yang dapat merepresentasikan seluruh elemen rakyat sekaligus memberikan gambaran bahwa neoliberalisme merupakan “musuh bersama” dan tepatnya pada 22 Desember 2006 pemilihan umum presiden diadakan

⁵ Eduardo A. Gamarra, Bolivia on the Brink, CSR no. 24, February 2007, Council of Foreign Relations dalam <http://d.scribd.com/docs/2cr6qqcewhfqx9lxuge.pdf>; internet; diakses 24 Agustus 2008

⁶ *Ibid*

di Bolivia dengan menempatkan Morales sebagai presiden terpilih dengan memperoleh suara terbanyak sebesar 53,899% dari 98,69% suara.⁷

Morales menjadi presiden pertama yang berasal dari suku Indian, apa yang dikatakan Gramsci sebagai konsensus dengan tujuan akhir kemenangan atau tujuan akhir MAS dengan menempatkan Morales sebagai presiden Bolivia telah memberikan gambaran bahwa pemahaman *framing* yang menjadi suksesnya gerakan sosial di Bolivia, terlebih lagi kemenangan MAS dan Morales sebagai presiden terpilih telah mengidentifikasi atau indikator dalam tujuan akhir dari *framing* (keberhasilan).

Kemenangan Morales telah mengartikan kebangkitan “kiri” di Amerika Latin, melalui elemen gerakan perlawanan rakyat. Maxwell A. Cameron mengklasifikasikan arti dari “kiri” adalah sebagai pemimpin, partai, dan gerakan,⁸ dengan tujuan menghilangkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan baik melalui mobilisasi ditingkat *grassroots* ataupun melalui peran elit politik dalam proses pengambilan kebijakan.⁹ Jorge G. Castaneda menambahkan kiri di Amerika Latin sebagai sesuatu yang modern, terbuka (*open-minded*), reformist, dan internasionalist¹⁰. Klasifikasi yang diungkapkan Castaneda sangat wajar mengingat jalan yang ditempuh Morales tetap membuka hubungan internasional dengan negara-negara lain pasca terpilihnya menjadi presiden Bolivia.

4.3 Memahami pembangunan aliansi organisasi gerakan sosial sebagai kerangka blok historis

Bentuk perlawanan telah meningkatkan kesadaran berserikat untuk memperoleh *bargaining position* yang lebih kuat terhadap negara. Setelah kedua kasus privatisasi serta kebijakan pembasmian koka telah menguatkan perlawanan panjang gerakan sosial yang lebih besar terlebih lagi rakyat telah menyadari bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak membuat hidup mereka sejahtera.

⁷ Robert E. Quirk, *op. cit*, hlm. 131. Setelah pada pemilu tahun 2002 menempatkan Morales di posisi kedua dengan memenangkan 8 dari 27 kursi senat dan 27 dari 130 kursi di kongres. Lihat Hempri Suyatna, *op. cit*, hlm. 110-112; lihat juga lampiran hasil pemilu 2002

⁸ Maxwell A. Cameron, “Latin America’s Left Turn: Parties, Populism, Social Movement in the Post-Neoliberal Era”, diambil dari Nur Iman Subono, Jalan “Kiri” Amerika Latin Memasuki Era Baru?, pengantar dalam Nurani Soyomukti, *Hugo Chavez VS Amerika Serikat*, (Yogyakarta: Garasi, 2008), 13

⁹ Dalam kasus yang berbeda di Chili masa Allende, Arief Budiman menekankan peran mobilisasi (gerakan) yang seharusnya lebih besar dari pada strategi dari atas (strategi negara) untuk mendapatkan perubahan rakyat yang radikal. Lihat Arief Budiman, *Jalan Demokratis ke Sosialisme: Pengalaman Chili di Bawah Allende*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm. 11.

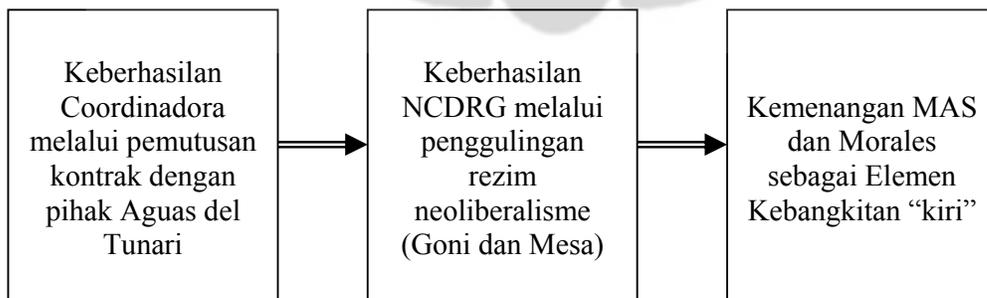
¹⁰ Jorge G. Castaneda, “Latin America’s Left Turn”, *Foreign Affairs*, Vol. 85, no. 3, Mei/Juni 2006, hlm. 29.

Pada sisi yang berbeda MAS telah menjadi instrument yang memfasilitasi perjuangan dan perlawanan organisasi-organisasi yang berbasiskan akar rumput, isu nasionalisme yang dilanjutkan dengan isu neoliberalisme sebagai “musuh bersama” yang dianggap telah meningkatkan kesejahteraan rakyat Bolivia yang semakin menurun, isu tersebut berhasil membawa MAS menjadi pihak oposisi pada pemilu 2002. Namun perlu dicatat MAS hanyalah sebagai instrumen rakyat dalam hal ini rakyat sangat membutuhkan suatu institusi untuk dapat memberikan aspirasi politiknya, dari sini suatu kesempatan politik telah terbuka bagi rakyat untuk memberikan aspirasi. Damping itu sumber daya eksternal dalam pencapaian kesempatan politik telah terlebih dahulu terbentuk melalui pembentukan LPP sebagai wujud partisipasi lokal.

James Petras menambahkan, Morales dan MAS sebagai instrumen politik telah menjadi penggerak perlawanan privatisasi air di Cochabamba, dan perlawanan terhadap privatisasi gas dikerangkakan Morales (sebagai pihak oposisi pada tahun 2002) untuk memberikan perlawanan kepada pemerintahan neoliberal (Estensorro, Goni, Banzer, dan Mesa).¹¹

Gramsci menekankan dalam membangun kelompok besar harus terdiri dari berbagai kekuatan sosial yang disatukan oleh sebuah konsepsi yang sama, peran MAS dalam membangun koalisi dari berbagai organisasi dan gerakan-gerakan yang berbasiskan akar rumput, hal ini terlihat ketika Morales pemimpin dari MAS setelah mendapatkan tempat sebagai pihak oposisi pasca pemilu 2002, MAS dan Morales mengambil jalan melalui perjuangan “turun kejalan” dengan bergabung dengan aliansi gerakan lain ketimbang melalui tingkat konstituen, mobilisasi rakyat dijalankan untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah.

Bagan 2 Proses keberhasilan aktor-aktor politik gerakan sosial



¹¹ James Petras dan Henry Veltmeyer, *op. cit.*, 201

Neoliberalisme dikerangkakan oleh gagasan sosialisme Morales sebagai perkembangan kapitalisme yang terkini bersama gerakan sosial di Bolivia MAS menempatkan analisa diri sebagai blok yang menentang “proyek” neoliberalisme yang diawali melalui kebijakan ekonomi baru.

Dalam hal ini privatisasi perusahaan Negara dan pembasmian ladang koka yang merupakan bagian dari proyek neoliberalisme adalah isu yang dibawa oleh Morales, MAS, bersama dengan gerakan-gerakan dan organisasi lainnya menentang kebijakan yang hanya membawa dampak buruk bagi rakyat. Inilah yang disebut Gramsci sebagai pembentuk blok historis baru dengan menempatkan neoliberalisme sebagai suatu hegemoni yang terjadi di Bolivia.

